

LAPORAN AKHIR

Penyusunan

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

PPKD

Kabupaten Halmahera Timur

2019



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Halmahera Timur

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

PPKD

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Halmahera Timur

2019

**Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)
Kabupaten Halmahera Timur – 2019**

©2019

xii, 300 hlm, 210 x 297 cm

Tim Penyusun:

Ir. Moh. Abdu Nassar, M.Si.
Hardi Musa, S.Pd., M.A.
Firdaus Duko, S.E., M.Si.
Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum.
Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.
Dr. Arlinah Madjid, M.Si.
Safrudin Abdulrahman, S.Sos., M.A.
Andi Sumar Karman, S.Sos., M.A.
Irfan Ahmad, S.S., M.A.
Bahtiar Hairullah, S.S., M.A.
Dahmayang Umasangaji, S.E.

Lay-out/Cover Designer

Tebings Art

© Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan nikmat pengetahuan, kekuatan, dan kesempatan sehingga dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Tanpa semua rahmat itu, mustahil bagi Tim Penyusun untuk menyelesaikannya.

Dokumen PPKD Kabupaten Halmahera Timur merupakan salah satu dokumen penting dalam kebijakan pembangunan kebudayaan oleh pemerintah. Sesuai amanat UU Pemajuan Kebudayaan, PPKD kabupaten/kota merupakan dokumen pada jenjang awal di tingkat pemerintah daerah. Dokumen ini selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan PPKD tingkat provinsi.

Di dalam dokumen ini kita akan menjumpai kebudayaan masyarakat Kabupaten Halmahera Timur melalui sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), ditambah Cagar Budaya. Data tentang OPK Kabupaten Halmahera Timur beserta permasalahan dan rekomendasi pemajuannya diurai secara berturut-turut dalam bab-bab dokumen ini.

Hingga dokumen PPKD Kabupaten Halmahera Timur dapat diselesaikan, Tim Penyusun memperoleh banyak dukungan perhatian, pengertian, dan kerjasama dari banyak pihak. Karena itu, sudah sepantasnya Tim Penyusun menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak tersebut. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua informan/partisipan yang telah bersedia memberikan informasi terkait dengan kebudayaannya. Demikian pula halnya kepada instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya yang telah bersedia memberikan data yang diperlukan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini belum sempurna sama sekali. Wilayah dan masyarakat Kabupaten Halmahera Timur yang cukup luas dan variatif jelas memberi pengaruh besar terhadap keragaman kebudayaan daerah ini. Hal ini berimplikasi pada metode dan hasilnya, sebagaimana dapat dijumpai dalam dokumen ini. Terhadap segala kekurangan itu, kami berharap dapat menyempurnakannya pada masa-masa yang akan datang. Meski demikian, kami telah berupaya melakukan secara optimal. Semoga hasilnya bermanfaat bagi semua pihak.

Kota Maba, Agustus 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Sambutan Bupati Halmahera Timur	
Sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
I. RANGKUMAN UMUM	
II. PROFIL KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	
II.1. Tentang Kabupaten Halmahera Timur	
II.1.1. Wilayah dan Karakteristik Alam	
II.1.2. Demografi	
II.1.3. Latar Belakang Budaya	
II.1.3.1. Corak Utama	
II.1.3.2. Keragaman Budaya	
II.1.4. Sejarah	
II.1.4.1. Sejarah Singkat Budaya	
II.1.4.2. Sejarah Singkat Wilayah Administratif	
II.1.5. Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan	
II.1.5.1. Peraturan yang Berlaku	
II.1.5.2. Peraturan yang Pernah Ada dan Sudah Tidak Berlaku	
II.2. Ringkasan Proses Penyusunan PPKD	
III.2.1. Tim Penyusun	
III.2.2. Proses Pendataan	
III.2.3. Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi	
III.2.4. Catatan Evaluasi Atas Proses Penyusunan	
III. LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN	
III.1. Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan	
III.2. Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan	
IV. DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	
IV.1. Manuskrip	
IV.2. Tradisi Lisan	
IV.3. Adat Istiadat	
IV.4. Ritus	
IV.5. Pengetahuan Tradisional	
IV.6. Teknologi Tradisional	
IV.7. Seni	
IV.8. Bahasa	
IV.9. Permainan Rakyat	
IV.10. Olahraga Tradisional	
IV.11. Cagar Budaya	

V. DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN	
V.1. Manuskrip	
V.2. Tradisi Lisan	
V.3. Adat Istiadat	
V.4. Ritus	
V.5. Pengetahuan Tradisional	
V.6. Teknologi Tradisional	
V.7. Seni	
V.8. Bahasa	
V.9. Permainan Rakyat	
V.10. Olahraga Tradisional	
V.11. Cagar Budaya	
VI. DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN	
VI.1. Manuskrip	
VI.2. Tradisi Lisan	
VI.3. Adat Istiadat.....	
VI.4. Ritus	
VI.5. Pengetahuan Tradisional.....	
VI.6. Teknologi Tradisional	
VI.7. Seni.....	
VI.8. Bahasa	
VI.9. Permainan Rakyat	
VI.10. Olahraga Tradisional	
VI.11. Cagar Budaya	
VII. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI	
VII.1. Permasalahan dan Rekomendasi	
VII.2. Upaya	
VII.3. Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum	
VIII. LAMPIRAN	
VIII.1. Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun PPKD	
VIII.2. Surat Keputusan Tim Penyusun tentang Pemilihan Koordinator	
VIII.3. Notulensi-notulensi Forum Terbuka	
VIII.4. Notulensi-notulensi Forum Diskusi Terpumpun	
VIII.5. Dokumentasi Foto	
VIII.6. Peraturan-peraturan yang Berkaitan dengan Kebudayaan	
VIII.7. Peraturan-peraturan yang Berkaitan dengan Kebudayaan yang Pernah Ada dan Sudah Tidak Berlaku	





PROFIL

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



II

Profil Kabupaten Halmahera Timur

II.1. Wilayah dan Karakteristik Alam

Kabupaten Halmahera Timur merupakan salah satu wilayah Provinsi Maluku Utara yang terdiri atas 10 (sepuluh) wilayah kecamatan dan 104 desa. Kabupaten Halmahera Timur memiliki wilayah seluas 14.202,01 km². Sebanyak 6.506,19 km² adalah daratan dan 7.695,82 km² merupakan lautan. Wilayah kabupaten ini mencakup sebanyak sepuluh kecamatan meliputi: Kecamatan Maba Selatan, Kota Maba, Maba, Maba Tengah, Maba Utara, Wasile, Wasile Utara, Wasile Tengah, Wasile Timur, dan Wasile Selatan. Kecamatan terluas adalah Wasile Selatan, yakni 1.77,62 km². Sebaliknya, kecamatan dengan luas terkecil adalah Wasile Timur, yakni hanya 4,89 km².

Tabel. Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Timur Menurut Kecamatan, 2017

	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Luas (km ²) <i>Total Area (km²)</i>	Persentase <i>Percentage</i>
	(1)	(2)	(3)
1.	Maba Selatan	485,51	7,46
2.	Kota Maba	835,71	12,84
3.	Maba	408,50	6,28
4.	Maba Tengah	527,68	8,11
5.	Maba Utara	899,45	13,82
6.	Wasile Utara	694,48	10,68
7.	Wasile Tengah	474,90	7,30
8.	Wasile Timur	318,40	4,89
9.	Wasile	483,95	7,44
10.	Wasile Selatan	1 377,62	21,17
	Halmahera Timur	6 506,20	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2019

Secara administratif, wilayah Kabupaten Halmahera Timur berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Utara di sebelah utara, Laut

Halmahera dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Di bagian selatan, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Tengah, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kota Tidore Kepulauan.

Tabel. Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, 2017

	Kabupaten/Kota Regency/City	Desa Village	Kelurahan Village
	(1)	(2)	(3)
1.	Maba Selatan	9	-
2.	Kota Maba	6	-
3.	Maba	10	-
4.	Maba Tengah	12	-
5.	Maba Utara	12	-
6.	Wasile Utara	8	-
7.	Wasile Tengah	8	-
8.	Wasile Timur	8	-
9.	Wasile	7	-
10.	Wasile Selatan	24	-
	Halmahera Timur	104	-

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2019

Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Maba Kota yang berjarak 235 km dari Kota Ternate. Berdasarkan jaraknya dari ibu kota kabupaten di Kota Maba, kecamatan terjauh adalah Kecamatan Wasile Selatan, yang berjarak 158,53 km. kecamatan terdekat dari ibu kota kabupaten adalah Kecamatan Maba Selatan yang hanya berjarak 40,76 km.

Tabel. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota kabupaten di Kabupaten Halmahera Timur, 2017

	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km) <i>Distance to Regency Capital</i> (km)
	(1)	(2)	(3)
1	Maba Selatan	Bicoli	40,759
2	Kota Maba	Maba Sangaji	1,474
3	Maba	Buli	43,799
4	Maba Tengah	Wayamli	82,849
5	Maba Utara	Dorosago	151,229
6	Wasile Utara	Labi-Labi	158,530
7	Wasile Tengah	Lolobata	105,219
8	Wasile Timur	Dodaga	79,372
9	Wasile	Cemara Jaya	79,372
10	Wasile Selatan	Nusa Jaya	156,115

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2019

Secara geografis, Kabupaten Halmahera Timur tergolong dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara 0-82 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kabupaten Halmahera Timur termasuk daerah pantai karena kurang lebih 80% desa/kelurahan berada di daerah pantai, sedangkan 20% lainnya daerah pengunungan. Wilayah daratan Kabupaten Halmahera Timur seluas 6.506,20 km² terletak pada posisi 0^o40' – 1^o4' Lintang Utara dan 126^o45' – 129^o30' Bujur Timur. Suhu udara di wilayah kabupaten ini bervariasi antara satu tempat dengan tempat lain karena perbedaan jarak dari permukaan air laut dan jarak dari pantai. Berdasarkan data dari stasiun pengamatan Ternate, diketahui suhu udara rata-rata sepanjang tahun 2017 adalah antara 27^oC hingga 28^oC. Kecepatan angin rata-rata pada 2017 antara 3 – 6 knots dengan kecepatan tertinggi pada bulan Februari. Curah hujan di wilayah kabupaten ini juga bervariasi karena pengaruh keadaan iklim, geografi, dan pertemuan arus udara. Berdasarkan beberapa kondisi ini, diketahui curah hujan sepanjang tahun 2017 adalah antara 121-367 mm.

Berdasarkan ketinggian di atas permukaan laut (dpl), kecamatan tertinggi adalah Kecamatan Maba Tengah, yakni 82 mdpl. Di bawah Maba Tengah terdapat Kecamatan Maba Utara dengan ketinggian 73 mdpl. Kecamatan dengan wilayah terendah di atas permukaan laut adalah Kecamatan Wasile Selatan yang terletak pada ketinggian 8 mdpl.

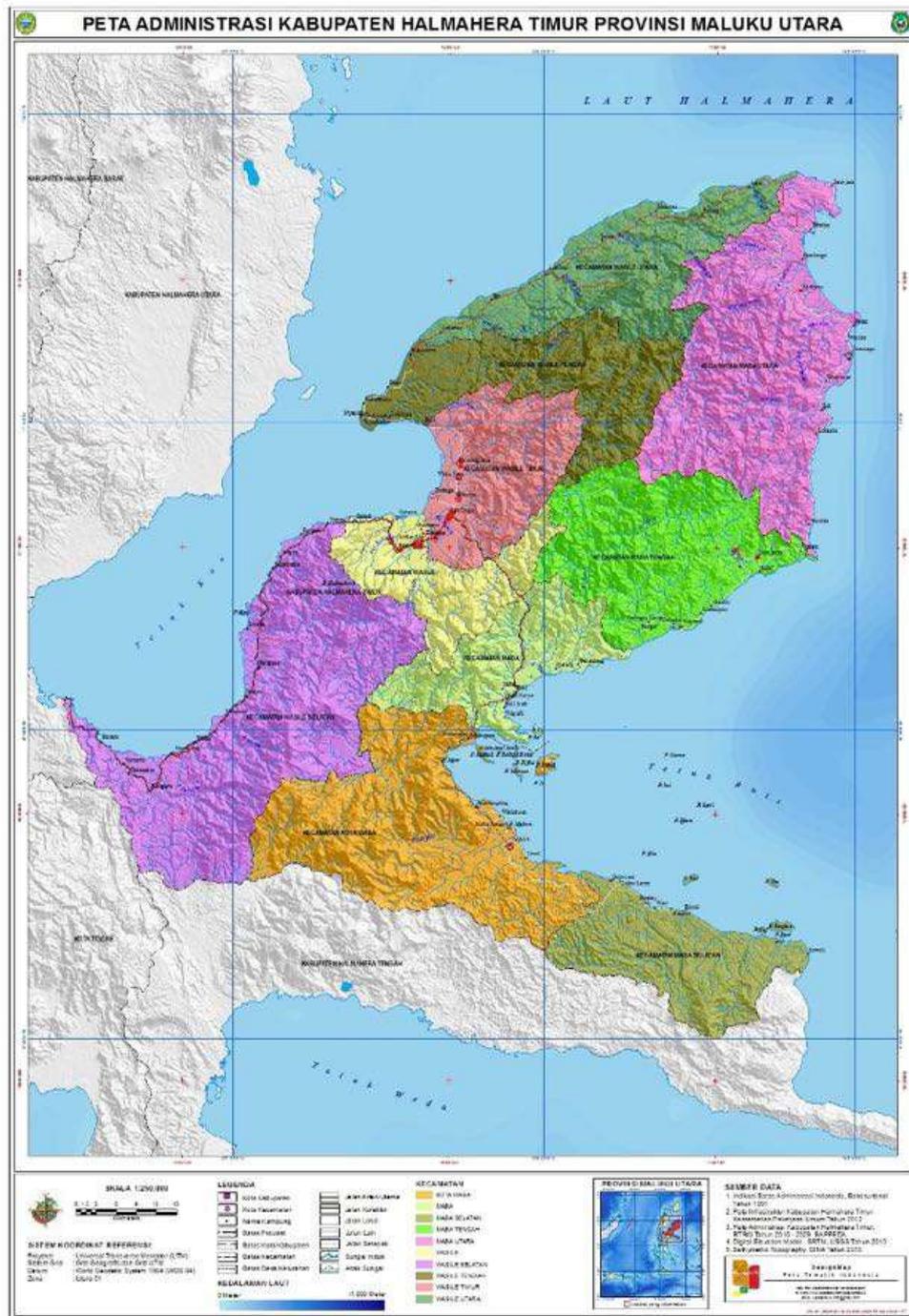
Tabel. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, 2017

	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of Subdistrict</i>	Tinggi (m) <i>Height (m)</i>
	(1)	(2)	(3)
1.	Maba Selatan	Bicoli	11
2.	Kota Maba	Maba Sangaji	11
3.	Maba	Buli	10
4.	Maba Tengah	Wayamli	82
5.	Maba Utara	Dorosago	73
6.	Wasile Utara	Labi-Labi	21
7.	Wasile Tengah	Lolobata	23
8.	Wasile Timur	Dodaga	20
9.	Wasile	Cemara Jaya	39
10.	Wasile Selatan	Nusa Jaya	8

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2019

Akses menuju ke Kabupaten Halmahera Timur, dari kota Ternate, dapat ditempuh melalui dua rute, yaitu jalur laut dan udara. Dengan menggunakan transportasi udara (pesawat), perjalanan menuju ibu kota kabupaten dapat ditempuh kurang lebih 15 menit untuk tiba di Buli dan selanjutnya ke Kota Maba. Jalur laut ditempuh dengan menggunakan *speed boat* dari Kota Ternate lalu ke Sofifi. Dari Sofifi perjalanan dilanjutkan ke Maba dengan menggunakan transportasi darat berupa sepeda motor atau mobil. Rute dan moda ini memerlukan waktu tempuh kurang lebih 6-7 jam. Dengan menggunakan *speed boat* dari kota Ternate menuju Dodinga kemudian dari Dodinga menggunakan transportasi darat menuju ke

Bobaneigo diperlukan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Dari Bobaneigo, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan transportasi laut (kapal) menuju Desa Subaim dengan waktu tempuh kurang lebih 5 jam. Dari desa Subaim perjalanan kemudian dilanjutkan lagi ke ibu kota Kabupaten dengan waktu tempuh kurang lebih 2-3 jam.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Timur

II.1.1. Demografi

Jumlah dan Kepadatan Penduduk. Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2017 adalah sebanyak 90.070 jiwa.

Sebanyak 47.178 jiwa di antaranya adalah laki-laki. Sisanya, sebanyak 42.892 jiwa adalah perempuan. Dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya (2015), maka jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 2,71 persen. Rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap perempuan adalah sebesar 109,99, yang berarti bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hingga 2017, kepadatan penduduk Kabupaten Halmahera Timur mencapai 14 jiwa/km². Di antara sepuluh kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, Kecamatan Wasile Timur merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi, yakni sebesar 38 jiwa/km². Sebaliknya, Kecamatan Wasile Selatan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah, yakni hanya 6 jiwa/km².

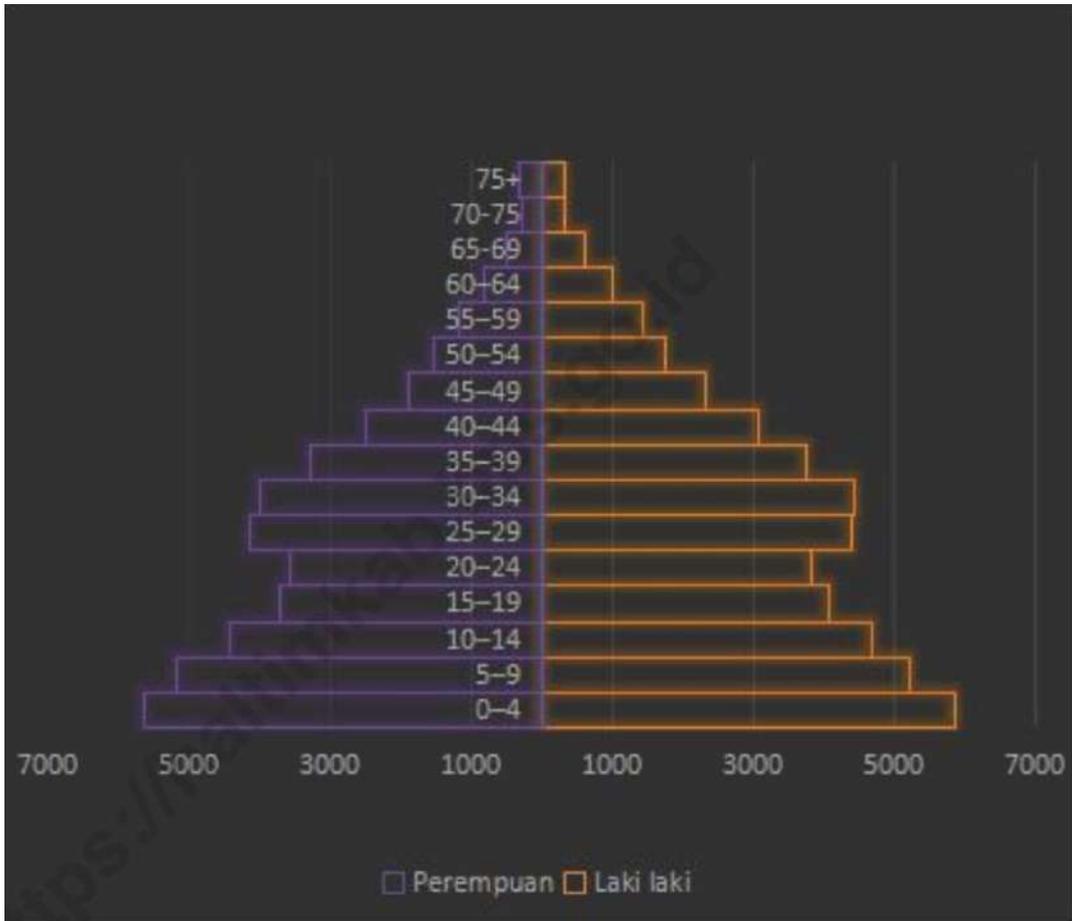
Kecamatan Maba Utara tergolong paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya. Dalam kurun waktu 2015-2017, kecamatan ini mengalami laju pertumbuhan sebesar 2,85 persen. Sebaliknya, Kecamatan Maba Tengah mengalami laju pertumbuhan penduduk paling rendah di kabupaten ini, yakni hanya 2,78 persen saja. Meski demikian, secara umum rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,82 persen.

Tabel. Jumlah Penduduk dan laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, 2017

Kecamatan Subdistrict	Jumlah Penduduk (ribu) <i>Population (thousand)</i>			Laju Pertumbuhan Penduduk (%) <i>Population Growth Rate (%)</i>	
	2010	2015	2017	2010-2015	2015-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Maba Selatan	6,14	7,12	7,53	3,11	2,80
2 Kota Maba	7,52	8,75	9,25	3,10	2,81
3 Maba	9,80	11,38	12,03	3,11	2,83
4 Maba Tengah	5,03	5,84	6,17	3,20	2,78
5 Maba Utara	6,95	8,29	8,77	3,11	2,85
6 Wasile Utara	4,29	4,95	5,23	3,11	2,83
7 Wasile Tengah	4,81	5,56	5,88	3,60	2,80
8 Wasile Timur	8,79	10,11	10,69	3,10	2,82
9 Wasile	9,02	10,38	10,98	3,10	2,84
10 Wasile Selatan	11,08	12,82	13,55	3,11	2,81
Halmahera Timur	73,41	85,20	90,07	3,11	2,82

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2019.

Piramida Penduduk. Piramida penduduk Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan kondisi tahun 2017 tergolong piramida *expansive*, yang berarti bahwa komposisi penduduknya sebagian besar berada pada kelompok umur muda. Penduduk pada rentang usia 0-9 tahun lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan usia 65 tahun ke atas.



Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2019.

Gambar. Piramida Penduduk Kabupaten Halmahera Timur (2017)

Tabel. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, 2017.

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jenis Kelamin (ribu) <i>Sex (thousand)</i>			Rasio Jenis Kelamin <i>Sex Ratio</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Maba Selatan	3,87	3,66	7,53	105,66
2 Kota Maba	5,02	4,22	9,25	118,94
3 Maba	6,41	5,62	12,03	114,07
4 Maba Tengah	3,29	2,88	6,17	113,98
5 Maba Utara	4,58	4,19	8,77	109,28
6 Wasile Utara	2,74	2,49	5,23	109,86
7 Wasile Tengah	2,97	2,90	5,88	102,34
8 Wasile Timur	5,53	5,16	10,69	107,13
9 Wasile	5,69	5,29	10,98	107,62
10 Wasile Selatan	7,08	6,47	13,55	109,44
Halmahera Timur	47,18	42,89	90,07	109,99

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2019.

Distribusi Penduduk Berdasarkan Umur. Penduduk Kabupaten Halmahera Timur lebih banyak berada pada usia 0-4 tahun, yakni sebanyak 11498 jiwa dengan laki-laki sejumlah 5874 dan 5624 perempuan. Jumlah ini disusul dengan penduduk pada kategori usia 5-9 tahun yang berjumlah 10408 jiwa, dengan distribusi berdasarkan jenis kelamin yakni sebanyak 5233 laki-laki dan 5175 perempuan. Penduduk pada kelompok usia 70-75 tahun termasuk paling sedikit jumlahnya, yakni 637 jiwa, dengan distribusi berdasarkan jenis kelamin sebanyak 318 laki-laki dan 280 perempuan.

Tabel. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Timur, 2017.

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	5 874	5 624	11 498
5-9	5 233	5 175	10 408
10-14	4 681	4 417	9 098
15-19	4 067	3 704	7 771
20-24	3 816	3 564	7 380
25-29	4 410	4 137	8 547
30-34	4 433	4 008	8 441
35-39	3 775	3 289	7 064
40-44	3 085	2 483	5 568
45-49	2 318	1 898	4 216
50-54	1 763	1 532	3 295
55-59	1 451	1 170	2 621
60-64	998	821	1 819
65-69	620	489	1 109
70-75	318	280	598
75+	336	301	637
Jumlah/Total	47 178	42 892	90 070

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2019.

Kondisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan. Sarana pendidikan di Kabupaten Halmahera Timur relatif sudah merata, meski umumnya terdapat di ibu kota kecamatan. Secara kuantitas, jumlah fasilitas pendidikan (sekolah) ini relatif memadai. Akan tetapi, hal ini belum memadai jika ditinjau dari segi kualitas. Hal ini dapat dilihat, salah satunya dari kondisi tenaga pengajar. Kondisi tenaga pengajar di Kabupaten

Halmahera Timur belum merata di antara semua kecamatan. Kondisi ketimpangan beban mengajar di antara kecamatan masih terjadi di Kabupaten Halmahera Timur. Di Kecamatan Maba Utara, seorang guru masih dibebani lebih dari 20 murid, jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang berada di bawah 20 murid.

Tabel. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan rasio Murid-Guru SD Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, 2017

	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Sekolah <i>Schools</i>	Murid <i>Pupils</i>	Guru <i>Teachers</i>	Rasio Murid- Guru/ <i>Pupil- Teacher Ratio</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Maba Selatan	9	1058	71	14,90
2	Kota Maba	6	966	51	18,94
3	Maba	7	1329	51	26,06
4	Maba Tengah	11	839	50	16,78
5	Maba Utara	13	1435	57	25,18
6	Wasile Utara	7	862	44	19,59
7	Wasile Tengah	8	795	48	16,56
8	Wasile Timur	11	1267	66	19,20
9	Wasile	7	1049	68	15,43
10	Wasile Selatan	20	1976	105	18,82
	Halmahera Timur	99	11576	611	18,95

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2019.

Tabel. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Halmahera Timur, 2017

	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Sekolah <i>Schools</i>	Murid <i>Pupils</i>	Guru <i>Teachers</i>	Rasio Murid- Guru/ Pupil- Teacher <i>Ratio</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Maba Selatan
2	Kota Maba
3	Maba
4	Maba Tengah
5	Maba Utara
6	Wasile Utara
7	Wasile Tengah
8	Wasile Timur
9	Wasile
10	Wasile Selatan
	Halmahera Timur	16	2 991	283	10,57

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2019.

Kabupaten Halmahera Timur memiliki 16 sekolah setingkat SMA/Kejuruan. Di sejumlah sekolah ini terdapat 2991 orang murid dengan guru sebanyak 283 orang. Kondisi ini menggambarkan rasio murid dengan guru sebesar 10,57.

Tabel. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Aliyah (MA) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, 2017

	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Sekolah <i>Schools</i>	Murid <i>Pupils</i>	Guru <i>Teachers</i>	Rasio Murid- Guru/ <i>Pupil- Teacher Ratio</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Maba Selatan	1	87	17	5,12
2	Kota Maba	-	-	-	-
3	Maba	-	-	-	-
4	Maba Tengah	-	-	-	-
5	Maba Utara	1	70	13	5,38
6	Wasile Utara	-	-	-	-
7	Wasile Tengah	-	-	-	-
8	Wasile Timur	1	99	6	16,50
9	Wasile	1	129	32	4,03
10	Wasile Selatan	-	-	-	-
	Halmahera Timur	4	385	68	5,66

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2019.

Distribusi Penduduk Berdasarkan Kesehatan. Hingga 2017, penduduk Kabupaten Halmahera Timur menderita penyakit dengan kasus tertinggi berupa ISPA (12938 kasus), nyeri otot/mialgia (3980 kasus), dan pilek (3300 kasus). Sarana kesehatan berupa rumah sakit sebanyak 1 unit, puskesmas sebanyak 14 unit, posyandu sebanyak 96 unit, dan polindes sebanyak 17 unit. Dalam hal tenaga kesehatan, di Kabupaten Halmahera Timur terdapat 106 perawat, 107 bidan, 11 tenaga farmasi, dan 30 orang dokter (10 dokter di rumah sakit, dan 20 lainnya tersebar di sejumlah puskesmas di Kabupaten Halmahera Timur).

Distribusi Penduduk Berdasarkan Agama. Penduduk Kabupaten Halmahera Timur mayoritas menganut agama Islam dengan persentase sebesar 68,25 persen. Agama kedua terbesar yang dianut oleh penduduk kabupaten ini adalah agama Protestan dengan persentase 31,33 persen. Di luar kedua agama ini, penduduk Kabupaten Halmahera Timur memeluk

agama Katolik, Hindu, dan Budha, dengan persentase yang kecil. Dengan kondisi penduduk berdasarkan agama yang dianut, maka terdapat 77 unit masjid dan 68 gereja protestan.

Tabel. Persentase Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Halmahera Timur, 2017

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Islam <i>Islam</i>	Protestan <i>Christian</i>	Katolik <i>Catholic</i>	Hindu <i>Hindu</i>	Budha <i>Buddha</i>	Lainnya <i>Other</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Maba Selatan	-
2. Kota Maba	92,75	7,12	0,13	-
3. Maba	43,70	55,31	0,99	-
4. Maba Tengah	72,36	27,59	0,05	-
5. Maba Utara	73,91	24,70	1,39	-
6. Wasile Utara	14,46	85,53	0,02	-
7. Wasile Tengah	37,52	62,42	0,06	-
8. Wasile Timur	94,48	5,31	0,21	-
9. Wasile	93,39	6,59	0,02	-
10. Wasile Selatan	-
Halmahera Timur	68,25	31,33	0,37	0,03	0,01	-

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2019.

Tabel. Jumlah Tempat Peribadatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, 2017

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Masjid <i>Mosque</i>	Mushola <i>Mushola</i>	Gereja Protestan <i>Christian Church</i>	Gereja Katholik <i>Catholic Church</i>	Pura <i>Temple</i>	Vihara <i>Vihara</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Maba Selatan	14	...	-	-	-	-
2. Kota Maba	7	...	2	-	-	-
3. Maba	4	...	10	1	-	-
4. Maba Tengah	6	...	9	-	-	-
5. Maba Utara	10	...	5	-	-	-
6. Wasile Utara	0	...	8	-	-	-
7. Wasile Tengah	3	...	16	-	-	-
8. Wasile Timur	12	...	3	-	-	-
9. Wasile	10	...	3	-	-	-
10. Wasile Selatan	11	...	12	-	-	-
Halmahera Timur	77	...	68	1	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2019

II.1.2. Latar Belakang Budaya

II.1.2.1. Corak Utama

Kabupaten Halmahera Timur didiami oleh empat suku bangsa yang dominan, yaitu: Togutil, Maba, Buli, dan Bicoli. Mereka ini yang sejak awal mendiami wilayah Kabupaten Halmahera Timur. Beberapa suku bangsa yang datang kemudian lalu menetap hingga saat ini, baik karena alasan mata pencaharian maupun perkawinan dengan suku bangsa setempat, meliputi suku bangsa Tobelo, Jawa, Sangir, Bugis, dan Buton. Kategori sosial yang didasarkan pada kesukubangsaan ini berasosiasi dengan pengidentifikasian diri sebagai "Orang Togutil", "Orang Maba", "Orang Buli", "Orang Bicoli": demikian seterusnya terhadap kelompok masyarakat yang lain. Penggunaan kata "Orang" yang mendahului kata tempat setelahnya menandakan bahwa ia berasal dari daerah yang disebut

dengan tradisi dan adat-istiadatnya masing-masing. Corak utama masyarakat dan kebudayaan di Kabupaten Halmahera Timur dapat dilihat dari asal-usul hingga tradisi tertentu dari kelompok tertentu.

Orang Togutil menjadi salah satu pencorak kebudayaan di Kabupaten Halmahera Timur. Orang Togutil disebut sebagai orang lokal, yang dalam beberapa istilah disebut sebagai “orang asli.” Kelompok suku bangsa ini beberapa di antaranya masih hidup mengembara di hutan Halmahera. Sementara yang sudah tinggal di kampung, baik atas program pemerintah (melalui Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil), masih tetap mempraktikkan berbagai tradisinya dengan ketat. Meski mereka sudah beragama Kristen, atau Islam, tetapi kepercayaan terhadap roh dan arwah leluhur tetap tidak ditinggalkan. Karena itu, sebagian besar tradisi dari kelompok Orang Togutil menjadi corak bagi kebudayaan di Kabupaten Halmahera Timur.

Corak lain dari kebudayaan di Kabupaten Halmahera Timur adalah tradisi *Cokaiba*. *Cokaiba* dilakukan setiap tahun pada orang Maba, Buli, dan Bicoli. Tradisi *cokaiba* dimaknai sebagai ritual yang berkaitan dengan maulid nabi Muhammad SAW pada kalangan orang Islam. Praktik *cokaiba* dilakukan dengan mengenakan kostum tertentu, terutama topeng kayu, dengan wilayah yang mencakup kampung. Orang-orang yang mengenakan kostum, menutupi wajahnya hingga tidak dikenali. Mereka berkeliling kampung dan mencambuk siapa saja yang dijumpainya di jalanan atau berada di luar rumah. Mereka tidak “mengganggu” orang yang berada dalam rumah. Kostum dan topeng yang dikenakan dianggap sebagai representasi setan atau jin. Jenis-jenis topeng berbeda jumlah dan coraknya berdasarkan lokasi. Sebanyak 28 jenis topeng tersebar di beberapa tempat, yakni 12 di Soa Sangaji, 9 di Soa Laipo, dan 7 di Buli.

Ritual *fasak sagu* pada orang, sebagai ritual tolak bala pada kalangan orang Maba, Buli, Bicoli. Ritual ini dilaksanakan tiap tahun di tempat terbuka, seperti lapangan, selama 2-3 hari lamanya. Ritual ini dimaksudkan untuk menghindari bencana seperti penyakit hingga yang mengakibatkan

kematian. Penyakit dianggap sebagai sesuatu yang dapat berasal dari luar kampung atau dari roh leluhur. Untuk menghindari keduanya, ritual *fasak sagu* ini digelar.

Secara umum, ekspresi budaya pada masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dapat dijumpai dalam berbagai aspek kehidupan. Kebudayaan orang Kabupaten Halmahera Timur terutama berkaitan dengan upacara lingkaran hidup (*life cycles*), adat istiadat, kesenian, dan sistem teknologi.

II.1.2.2. Keragaman Budaya

Keragaman budaya di antara suku bangsa di Kabupaten Halmahera Timur saat ini dapat dilihat dari ekspresi budaya masing-masing kelompok, seperti digambarkan di atas. Dengan memperhatikan sepuluh aspek Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), atau tujuh unsur universal kebudayaan, maka keragaman masyarakat dan budaya di Kabupaten Halmahera Timur dapat dijumpai dengan jelas. Meski demikian, keragaman ini tidak menyolok secara tegas karena adanya kesamaan atau keserupaan sejarah di antara kelompok masyarakat lokal. Hal inilah yang membentuk keragaman budaya di Kabupaten Halmahera Timur.

Salah satu faktor yang menambah keragaman budaya di Kabupaten Halmahera Timur adalah program transmigrasi suku bangsa Jawa. Trasmigran yang banyak di jumpai di wilayah Subaim hingga saat ini masih mempraktikkan tradisi dari asal mereka di Jawa. Masyarakat lokal, misalnya orang Togutil, bahkan ikut pula menyemarakkan dalam tradisi tertentu, misalnya yang berkaitan dengan kesenian orang Jawa. Pada tradisi ritual yang berkaitan dengan musim tanam atau panen, orang Jawa biasanya melakukan hingga beberapa malam dan disertai dengan pementasan seni.

II.1.3. Sejarah

II.1.3.1. Sejarah Singkat Budaya

Meski tidak diperoleh data yang jelas mengenai kapan pertama kali wilayah ini dihuni, namun berdasarkan sejarah persebaran suku-suku yang mendiami wilayah tersebut, maka sejarah wilayah ini tidak terlepas dari kisah tentang *Gamrange*. Gamrange adalah kisah mengenai "*tiga negeri*" yaitu: Maba, Weda dan Patani (terdapat juga versi yang menyebutkan Gebe dan Makean). Di antara wilayah tersebut, hanya Maba yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur, sedangkan dua wilayah terakhir yaitu: Weda dan Patani, secara administratif merupakan wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Mengungkap sejarah perkembangan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur, pada dasarnya adalah membicarakan tentang sejarah perkembangan dan penyebaran Suku Maba.

Legenda (sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang tanpa pengarang atau penutur awal yang jelas namun diwariskan dan diyakini secara turun temurun) pada beberapa kelompok masyarakat yang dianggap sebagai *kampung tua* di wilayah Halmahera Timur, kerap dikenal sebagai legenda masyarakat Halmahera Timur hingga masa *Momole*).

Berdasarkan kategori rumpun bahasa dunia, kelompok masyarakat Kabupaten Halmahera Timur termasuk dalam penutur rumpun bahasa Austronesia. Meski berasal dari rumpun bahasa yang sama, namun penggunaan bahasa dalam sapaan dan ujaran sehari-hari mereka menunjukkan beberapa perbedaan kosa kata yang menyolok. Bahkan terhadap kelompok masyarakat yang berbeda, terdapat kesulitan untuk mengucapkan bahasa yang bukan milik kelompoknya.

Bahasa sebagai salah satu batasan identitas suku bangsa, menjadi pembatas terhadap ketiga suku bangsa tersebut, walaupun tidak secara tegas memisahkan ketiganya. Karena pada kenyataannya, dalam beberapa hal mereka sering menyebut diri sebagai *Orang Maba*. Berdasarkan hal

tersebut, studi lapangan berhasil mengidentifikasi tiga bahasa dominan yaitu: Bahasa Maba (Bahasa *woso*), Bahasa Buli, dan Bahasa Bicoli. . Interaksi sosial yang terjadi secara intens terhadap kelompok-kelompok suku yang ada berimplikasi pada kemampuan memahami makna dari bahasa yang bukan milik kelompoknya.

Selain kelompok masyarakat Soa Sangaji, Maba Sangaji dan Soa Laipo di Kecamatan Kota Maba, bahasa Maba digunakan pula oleh masyarakat yang terdapat di Desa Lolobata, Subaim, dan Fayau. Variasi penggunaan bahasa terhadap kelompok tersebut terletak pada dialeknya saja. Sementara itu, Bahasa Buli yang merupakan bahasa asli kelompok masyarakat Soa Gimalaha dan Wailukum, selain menjadi bahasa sehari-hari di tempat asalnya, juga telah menyebar ke wilayah lain baik dalam lingkup Kabupaten Halmahera Timur maupun ke wilayah yang lebih luas. Menurut cerita, leluhur Orang Buli pada awalnya bermukim di Jara-jara. Pada suatu ketika ia memburu babi hingga wilayah dekat Maba. Perbedaan tempat asal leluhur ini dianggap sebagai sumber perbedaan bahasa terhadap kedua kelompok ini.

II.1.3.2. Sejarah Singkat Wilayah Administratif

Kabupaten Halmahera Timur sebagai sebuah wilayah pemerintahan secara administratif pada awalnya hanya terdiri dari 4 kecamatan, yaitu: Kecamatan Maba, Kecamatan Wasile, Kecamatan Maba Selatan, dan Kecamatan Wasile Selatan. Seiring dengan adanya tuntutan dari masyarakat yang menginginkan dilakukannya pemekaran wilayah, maka pada akhir tahun 2006 dimekarkan dan diresmikan menjadi 10 wilayah kecamatan meliputi: Maba, Maba Utara, Maba Tengah, Wasile, Wasile Timur, Wasile Tengah, Wasile Utara, Wasile Selatan, Maba Selatan dan Kota Maba. Hingga saat ini (2019), wilayah administratif Kabupaten Halmahera Timur mencakup kesepuluh kecamatan ini.

II.1.4. Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan

II.1.4.1. Peraturan yang Berlaku

Hingga saat ini, belum/tidak ada peraturan tingkat daerah yang mengatur atau berkaitan dengan kebudayaan di Kabupaten Halmahera Timur.

II.1.4.2. Peraturan yang Pernah Ada dan Sudah Tidak Berlaku

Hingga saat ini, belum/tidak ada peraturan tingkat daerah yang mengatur atau berkaitan dengan kebudayaan di Kabupaten Halmahera Timur.

II.2. Ringkasan Proses Penyusunan PPKD

2.2.1 Tim Penyusun

Tim Penyusun PPKD Kabupaten Halmahera Timur ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/430/97/2019 tanggal 17 April 2019 Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis kegiatan, Tim Penyusun bekerja melakukan pendataan, perumusan permasalahan, penyusunan rekomendasi dan indikator kerja untuk setiap rekomendasi untuk dirangkum dalam dokumen Rancangan PPKD dan diserahkan kepada Bupati.

Berdasarkan SK Bupati Halmahera Timur, komposisi Tim Penyusun, sebagai berikut.

1. Ir. Moh. Abdu Nassar, M.Si., selaku Koordinator Tim. Ia menduduki jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Hardi Musa, S.Pd., M.A, sebagai anggota 1 Tim Penyusun PPKD Kabupaten Halmahera Barat adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur.

3. Firdaus Duko, S.E., M.Si., sebagai anggota 2 Tim Penyusun PPKD Kabupaten Halmahera Barat, saat ini menjabat sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Timur.
4. Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum., adalah anggota 3 Tim Penyusun PPKD Kabupaten Halmahera Timur adalah akademisi dari Universitas Khairun, Fakultas Ilmu Budaya, dengan bidang keahlian kebudayaan dan linguistik.
5. Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum., adalah anggota 4 Tim Penyusun PPKD Kabupaten Halmahera Timur adalah akademisi dari Universitas Khairun, Fakultas Ilmu Budaya, dengan bidang keahlian kebudayaan dan sastra.
6. Dr. Arlinah Madjid, M.Si., anggota 5 Tim Penyusun PPKD Kabupaten Halmahera Timur adalah akademisi dari Universitas Khairun, Fakultas Ilmu Budaya, dengan bidang keahlian kebudayaan dan kesukubangsaan. Ia salah satu peneliti dan penyusun *Database Sosial Budaya Kabupaten Halmahera Timur* (2009) dan *Profil Sejarah dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara* (2008).
7. Safrudin Abdulrahman, S.Sos., M.A., anggota 5 Tim Penyusun PPKD Kabupaten Halmahera Timur adalah akademisi dari Universitas Khairun adalah akademisi dari Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun. Magisternya diperoleh dari UGM Yogyakarta setelah menyelesaikan tesisnya tentang etnomedisin pada orang tugutil (Tobelo Dalam) di Halmahera Timur. Penelitiannya menyangkut masyarakat dan kebudayaan di Maluku Utara secara umum, dan Kabupaten Halmahera Timur secara khusus. Keahliannya terutama dalam bidang kesehatan tradisional (etnomedisin). Ia juga wakil perguruan tinggi di Maluku Utara untuk program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Maluku Utara sejak tahun 2002 hingga saat ini. Selain itu, ia juga pernah

melakukan identifikasi nilai budaya masyarakat di Maluku Utara. Ia juga menjadi tim penyusun Muatan Lokal untuk sekolah dasar di Kabupaten Pulau Taliabu (2016) dan Kabupaten Pulau Morotai (2017) bersama dinas pendidikan dan kebudayaan setempat. Di Pulau Taliabu, ia menjadi tim penyusun Kamus Bahasa Taliabu – Bahasa Indonesia dan penyusunan buku *Pulau Taliabu: Budaya, Sejarah, Masyarakat dan Perubahan (2017)*.

8. Andi Sumar Karman, S.Sos., M.A., adalah akademisi yang bekerja sebagai pengajar di Program Studi Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun. Pendidikan master ia selesaikan di UGM Yogyakarta. Selain meneliti masalah etnisitas, bidang keahliannya dalam bidang sosial budaya adalah kebudayaan masyarakat pesisir dan maritim. Di Halmahera Barat, ia pernah menjadi anggota tim peneliti Penyusunan Database Perikanan Kabupaten Halmahera Barat (2007). Pada tahun 2008, ia juga meneliti tentang *Identifikasi Objek Wisata dan Strategi Pengembangan Masyarakat di Sekitar Objek Wisata* yang merupakan hasil kerjasama antara Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun dengan UNDP Maluku Utara. Ia juga menjadi tim peneliti *Identifikasi Kearifan Lokal dan Strategi Implementasinya untuk Pembangunan Maluku Utara (2009)*. Ia juga menjadi tim penyusun Muatan Lokal untuk sekolah dasar di Kabupaten Pulau Taliabu (2016) dan Kabupaten Pulau Morotai (2017) bersama dinas pendidikan dan kebudayaan setempat. Di Pulau Taliabu, ia menjadi tim penyusun Kamus Bahasa Taliabu – Bahasa Indonesia dan penyusunan buku *Pulau Taliabu: Budaya, Sejarah, Masyarakat dan Perubahan (2017)*.
9. Irfan Ahmad, S.S., M.A., adalah sarjana dan master dalam bidang Ilmu Sejarah. Pendidikan master ia raih dari Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta. Di Pulau Taliabu, ia menjadi tim penyusun Kamus

Bahasa Taliabu – Bahasa Indonesia dan penyusunan buku *Pulau Taliabu: Budaya, Sejarah, Masyarakat dan Perubahan (2017)*. Ia aktif dalam berbagai kegiatan budaya dan kesenian di Maluku Utara. Karena keahliannya juga, ia kerap diminta menjadi juri pada berbagai kegiatan kesenian di Maluku Utara. Ia juga aktif menulis bahan bacaan untuk anak sekolah sebagai bagian dari program literasi.

10. Bahtiar Hairulah, S.S., M.A., adalah sarjana dan master dalam bidang Ilmu Antropologi. Pendidikan master ia raih dari Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta. Di Pulau Taliabu, ia menjadi tim penyusun Kamus Bahasa Taliabu – Bahasa Indonesia dan penyusunan buku *Pulau Taliabu: Budaya, Sejarah, Masyarakat dan Perubahan (2017)*. Ia aktif dalam berbagai kegiatan budaya dan kesenian di Maluku Utara. Karena keahliannya juga, ia kerap diminta menjadi juri pada berbagai kegiatan kesenian di Maluku Utara. Ia juga aktif menulis bahan bacaan untuk anak sekolah sebagai bagian dari program literasi.
11. Dahmayang Umasangaji, S.E., adalah Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur.

2.2.2 Proses Pendataan

Proses pengumpulan data sepuluh OPK dilakukan mengikuti metode penelitian kualitatif, dengan tetap mengacu pada panduan yang dicantumkan dalam petunjuk teknik penyusunan PPKD yang dikeluarkan oleh Dirjen Kebudayaan RI.

Waktu penelitian lapangan dilakukan selama seminggu. Sebelum dan sesudah ke lapangan, tim peneliti telah melakukan kajian dokumen, atau disebut studi dokumen. Selama seminggu lamanya di lapangan, peneliti melakukan observasi secara bersamaan dengan wawancara.

Hal ini dilakukan dengan ketat dan padat. Singkatnya waktu yang tersedia untuk menyelesaikan dokumen menuntut ketekunan yang tinggi dari Tim Penyusun.

Sebanyak sembilan kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat dikunjungi dan dikumpulkan data OPK-nya. Peneliti tinggal bersama dengan pelaku budaya sesuai lokasi masing-masing. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dapat dipastikan keabsahannya. Secara metodologi, teknik ini sekaligus menjadi cara analisis dalam jenis penelitian kualitatif, atau yang kerap disebut dengan *ongoing analysis*. Analisis kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak peneliti menginjakkan kaki pertam kali di lokasi studi hingga laporan penelitian (dokumen PPKD) disusun.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data OPK terdiri atas tiga cara, yakni: studi dokumen, observasi atau pengamatan, wawancara mendalam (*indepth interview*), dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman yang telah ditentukan oleh Dirjen Kebudayaan RI. Dalam praktiknya, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur.

Studi dokumen atau studi literatur merupakan teknik pengumpulan data menggunakan referensi yang relevan dengan kebutuhan data PPKD. Termasuk ke dalam dokumen ini adalah hasil-hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema atau OPK, jurnal ilmiah, buku, dan berbagai bentuk publikasi lainnya. Hasil penelitian menggunakan penelitian yang dilakukan oleh dosen Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun, yakni: *Penyusunan Profil Sejarah dan Budaya Halmahera Barat* (FSB, 2008), *Identifikasi Kearifan Lokal Halmahera Barat* (Amin dkk, 2018), *Identifikasi Objek Wisata dan Strategi Pengembangan Masyarakat di Sekitar Objek Wisata* (Sumar-Karman dkk, 2008), *Tradisi Lisan Halmahera Timur* (ATL, 2016), *Nilai-nilai Budaya Masyarakat Maluku Utara* (Abdulrahman dkk, 2006). Selain hasil penelitian yang disebutkan tadi, data bersumber dokumen juga diperoleh dari monografi LIPI, jurnal ilmiah, surat kabar, dan publikasi dari instansi pemerintah, seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur.

Teknik observasi (pengamatan) adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif. Meski tak sepenuhnya aktif, teknik ini diterapkan peneliti OPK di lapangan dengan berperan serta dalam beberapa aktivitas budaya yang sedang berlangsung saat peneliti OPK berada di lapangan penelitian. Selain itu, pengamatan juga dilakukan pada peristiwa budaya, tempat-tempat di mana peristiwa berlangsung, lokasi ritual, adat istiadat, cara hidup masyarakat, dan berbagai aspek budaya lainnya. Teknik ini sangat penting artinya dalam memperkuat data hasil wawancara dari informan. Atau sebaliknya, hasil pengamatan menjadi pemantik bagi wawancara yang dilakukan kemudian.

Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan kepada informan kunci. Mereka ini adalah para pelaku budaya yang mengetahui dengan baik topik-topik wawancara. Informan ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*) berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai latar belakang informan. Kalangan ini termasuk ke dalamnya adalah *tetua adat*, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau anggota komunitas. Informan ahli mencakup pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan memadai terkait topik wawancara OPK. Kalangan ini meliputi pemerintah setempat (desa atau lurah, camat, petugas pemerintah, dll).

Focus Group Discussion (FGD), dalam penyusunan PPKD ini dilakukan dengan partisipan dari kalangan aparat pemerintah (kabupaten/kecamatan/desa), tokoh adat dan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur, serta akademisi.

2.2.3 Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi

Penyusunan masalah dan rekomendasi dilakukan secara formal melalui rapat-rapat tim penyusun berdasarkan informasi dan data yang dikumpulkan peneliti melalui penelitian lapangan dan Diskusi Terpumpun (*Focuss Group Discussion*, FGD).

Rapat tim Penyusun dilakukan sebanyak tiga kali. Ketiganya dilakukan setelah pengumpulan data lapangan dan FGD. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada 25-30 Mei 2019. Untuk mencakup semua lokasi studi, yakni sebanyak sebanyak sepuluh kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur, tim

penyusun dibantu oleh tenaga pengumpul data lapangan. Para tenaga lapangan ini telah mendapatkan pengetahuan dan pembekalan terlebih dahulu mengenai glosarium instrumen serta arah dan maksud dari tiap-tiap poin pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen.

Selama berada di lapangan studi, peneliti menyerap dan mengamati serta mendiskusikan berbagai hal yang menjadi permasalahan beserta solusi yang diharapkan dari para pelaku kebudayaan yang sedang diteliti. Hasilnya, dituangkan ke dalam formulir isian PPKD dan lembaran khusus yang merupakan resume atas catatan lapangan terkait permasalahan OPK.

Tim Penyusun melakukan rapat pertama kali untuk membahas temuan lapangan terkait hasil pendataan OPK pada 10 Juni 2019. Data hasil studi lapangan yang telah diklasifikasi sedemikian rupa dibahas dalam rapat ini. Selain Tim Penyusun, para tenaga lapangan dilibatkan dalam rapat ini. Rapat ini sudah menghimpun ikhtisar permasalahan beserta rekomendasi-rekomendasinya yang berasal dari para informan dari tiap-tiap lokasi.

Pada 17 Juni 2019, Tim Penyusun kembali melakukan rapat. Berbagai permasalahan yang dihimpun berdasarkan *suara informan*, diolah ditafsirkan oleh tim penyusun tanpa menghilangkan keaslian gagasannya. Dengan kata lain, tafsiran tim penyusun tetap berlandaskan realitas lapangan dan kondisi masing-masing OPK. Rapat ini juga sekaligus menjadi wadah pembahasan tentang persiapan pelaksanaan FGD.

FGD dilakukan pada 25 Juni 2019. Partisipan dalam FGD berasal dari informan pilihan dari sepuluh kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur. Setiap peneliti lapangan merekomendasikan informan yang dianggap dapat dan layak menjadi representasi kelompok masyarakat atau komunitas yang diwakilinya.

Draf permasalahan dan rekomendasinya yang telah dibuat oleh Tim Penyusun diajukan saat FGD. Selain melakukan diskusi terkait OPK, perumusan masalah dan rekomendasinya dilakukan dalam FGD. Peserta FGD memberikan tanggapan berupa masukan permasalahan dan rekomendasi solusinya, baik terhadap draf yang disediakan Tim Penyusun maupun yang sifatnya usulan-usulan baru. Hasil FGD selanjutnya disarikan

oleh Tim Penyusun dan dituangkan ke dalam dokumen dengan format sebagaimana ditunjukkan oleh Petunjuk Teknis kegiatan penyusunan PPKD dari Dirjen Kebudayaan RI.

2.2.4 Catatan Evaluasi Atas Proses Penyusunan

Proses penyusunan PPKD di Kabupaten Halmahera Timur, meski berjalan lancar, tetapi bukannya tanpa kendala. Secara garis besar, kendala dimaksud mencakup: anggaran, komposisi tim, dan koordinasi tim penyusun.

Bagaimanapun, setiap program atau kegiatan memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Penyusunan dokumen PPKD yang seolah tiba-tiba oleh pemda menyebabkan tidak adanya penganggaran khusus untuk kegiatan ini. Akan tetapi, demi memenuhi tuntutan UU Pemajuan Kebudayaan dan arahan Dirjen Kebudayaan RI, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengatasi hal ini dengan mengalihkan kegiatan yang direncanakan di Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dianggap masih searah dengan kegiatan ini. Hanya saja, karena sifatnya taktis, maka beberapa komponen pembiayaan tidak mendapat porsi yang maksimal. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas seluruh proses penyusunan dokumen.

Komposisi Tim Penyusun juga tak lepas dari kendala selama proses penyusunan dokumen. Jika ditinjau dari keterlibatan dan keterlibatan instansi pemerintah kabupaten, elemen-elemen yang terlibat dalam penyusunan ini seharusnya cukup memadai. Akan tetapi, dukungan dari sisi kebijakan seringkali kurang optimal tanpa perhatian yang tinggi pada sisi praktis kegiatan ini. Selain perguruan tinggi atau akademisi, kalangan aparat pemerintah atau instansi lebih banyak terlibat sebagai personalia di *belakang meja* saja. Padahal, inti dokumen ini adalah data-data lapangan dan dokumen yang dihimpun melalui suatu metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu, ke depannya tim ini seharusnya lebih banyak menggunakan peneliti dari akademisi yang bergerak di bidang kebudayaan.

Kesibukan tim penyusun dari berbagai instansi pemerintah juga menyebabkan sulitnya koordinasi. Ketimbang beroperasi secara optimal,

personalia tim dari instansi lebih bersifat formalitas. Ke depan, penyusunan dokumen sebaiknya ditangani sepenuhnya oleh perguruan tinggi dengan personalia berlatar belakang atau keahlian di bidang kebudayaan. Dukungan pendanaan dan ihwal birokrasi disediakan pemda secara layak agar semua proses kegiatan berjalan optimal.



**LEMBAGA
PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN**



III

LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN

III.1 Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan

Kabupaten Halmahera Barat belum memiliki pendidikan menengah yang secara khusus memfokuskan diri pada bidang kebudayaan.

III.2 Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan

Seperti halnya dengan kondisi lembaga pendidikan menengah, pendidikan tinggi di Kabupaten Halmahera Barat belum ada yang secara khusus memiliki fakultas, jurusan, atau program studi yang berasosiasi dengan kebudayaan, misalnya sekolah seni, fakultas humaniora atau ilmu budaya, dll.



DATA

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN



IV DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

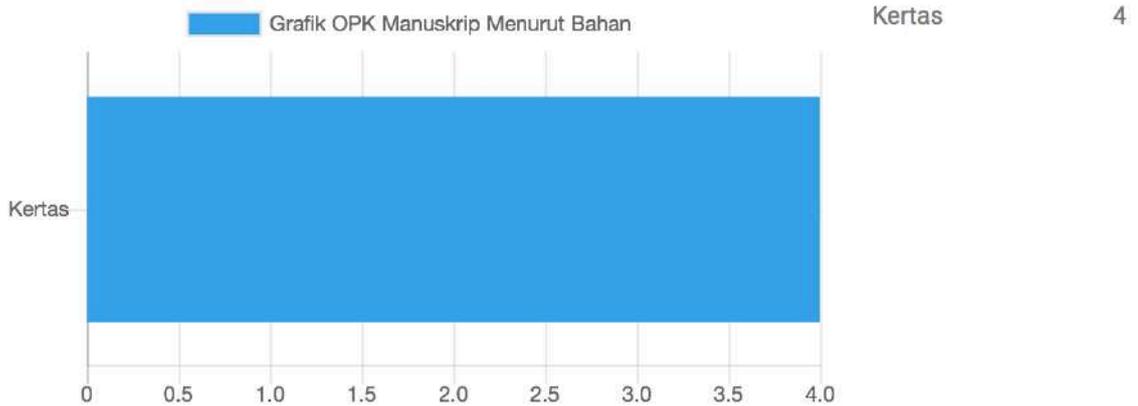
IV.1. Manuskrip

Tabel Manuskrip di bawah menunjukkan ada empat manuskrip yang hingga sekarang masih tersimpan rapi di tempatnya. Manuskrip tersebut adalah *Al'quran Tua*, *Doa-doa Tarekat* dan *Sertifikat Kepemilikan Tanah*. Manuskrip tersebut msih dipergunakan oleh pemiliknya disaat-saat tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

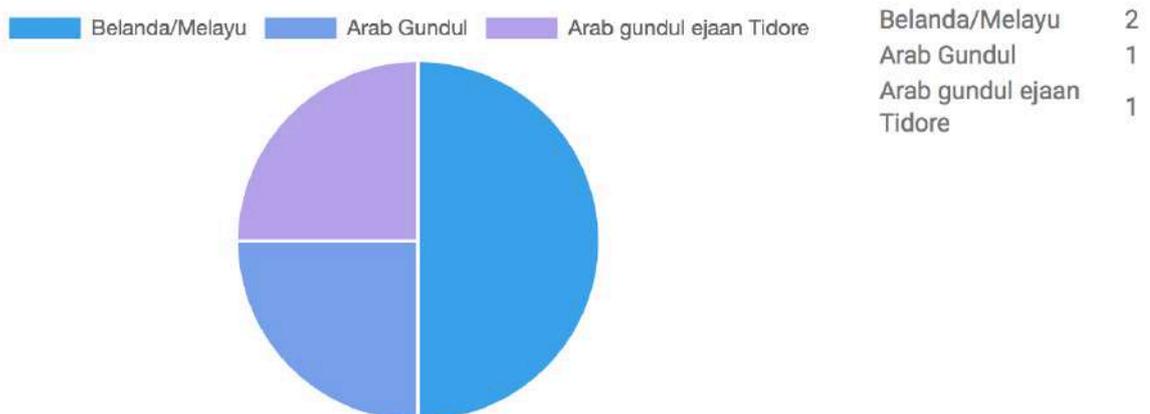
Empat Manuskrip yang di gambarkan pada tabel statistik di bawah, kesemuanya menggunakan sarana masyarakat. Sedangkan produk hukum dan lembaga yang bergerak atau berhubungan dengan OPK tersebut tidak ada di Kabupaten Halmahera Timur. Pemerintah juga hingga sekarang ini belum menyediakan sarana untuk melestarikan manuskrip tersebut.

Grafik OPK Manuskrip menurut bahan yang digunakan pada manuskrip yang ada di Kabupaten Halmahera Timur masih dalam bentuk asli. Bahan yang digunakan adalan bahan kertas atau *notes*.

Jumlah Objek Manuskrip		4
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	5
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		4



Presentase Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Halmahera Timur menurut bahasa yang digunakan dalam penulisan manuskrip terdapat tiga bahasa yaitu Belanda/melayu, Arab Gundul, dan Arab Gundul Ejaan Tidore. Pada bahasa Belanda/melayu terdapat dua manuskrip dan Arab Gundul ada satu manuskrip serta satu manuskripnya menggunakan bahasa Arab gundul ejaan Tidore. Pengaruh bangsa Belanda di masa penjajahan membuat banyak masyarakat menulis dalam bahasa Belanda/ melayu. Selain Belanda ada juga pengaruh bahasa Arab yang tersebar di hampir semua pelosok Kabupaten. Sedangkan bahasa Arab gundul ejaan Tidore merupakan pengaruh wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore pada masa kerayaan, sehingga masyarakat terbawa dengan bahasa yang didatangkan oleh pihak kerajaan.

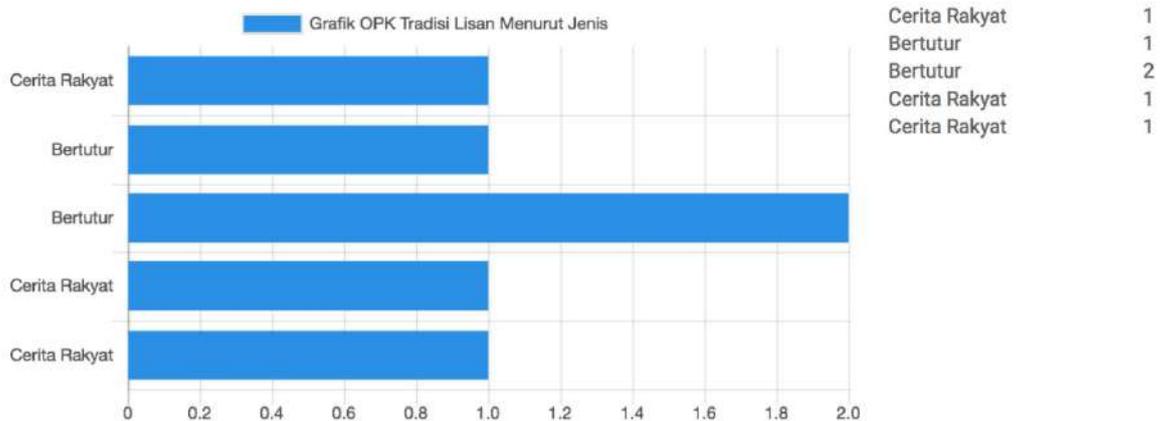


IV.2. Tradisi Lisan

Jumlah OPK Tradisi lisan masyarakat Halmahera Timur dapat dilihat pada tabel statistik di bawah. Sebanyak lima tradisi lisan hingga kini masih dilaksanakan. Etnis yang melaksanakan tradisi lisan yaitu; Etnis Maba, buli, Togutil, Bicoli, Wayamli, dan Subaim.

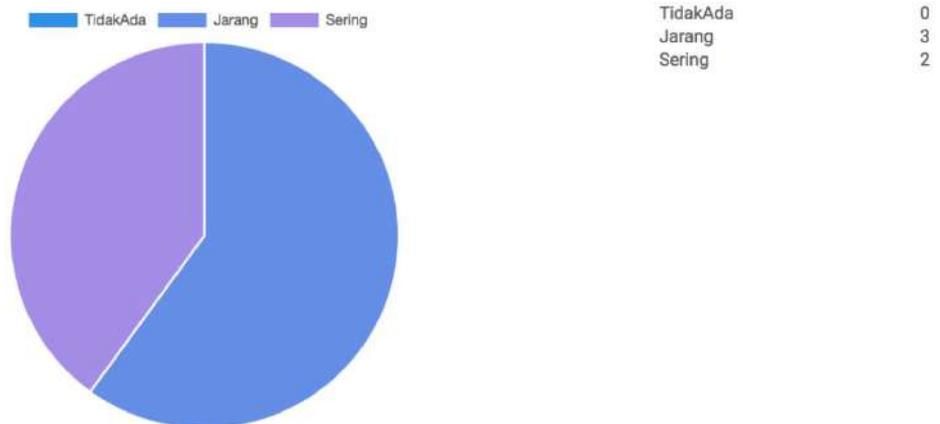
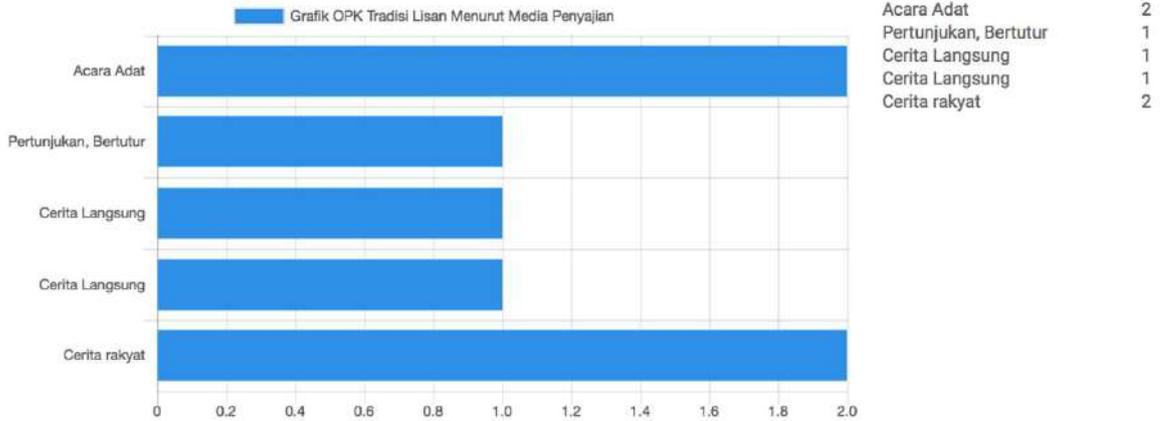
Beberapa OPK Tradisi Lisan yang ada di Halmahera Timur masih dalam jenis bertutur dan cerita rakyat. Dari jenis-jenis inilah yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Halmahera Timur.

Jumlah Objek Tradisi Lisan		5
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	5
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		3



Berdasarkan data grafik OPK Tradisi Lisan menurut media penyajiannya masyarakat Halmahera Timur masih menggunakan media bertutur. Namun dituturkan pada acara-acara adat dan diceritakan secara langsung ketika ada hajatan bersama, dimana masyarakat berkumpul untuk melakukan acara tersebut, di situlah terdapat Tradisi lisan yang dituturkan oleh pemilik tradisi.

Pada data diagram di bawah telah menggambarkan berapa banyak Tradisi Lisan menurut frekuensi pelaksanaannya masih sering dilakukan dan sudah jarang dilakukan pada masyarakat Halmahera Timur. Intinya, frekuensi yang ditunjukkan di bawah merupakan OPK yang masih mengalir pada masyarakat.



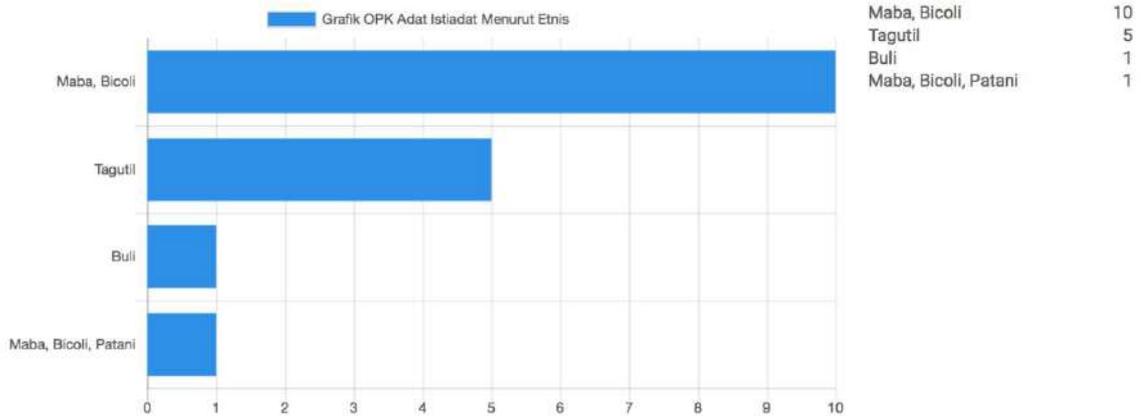
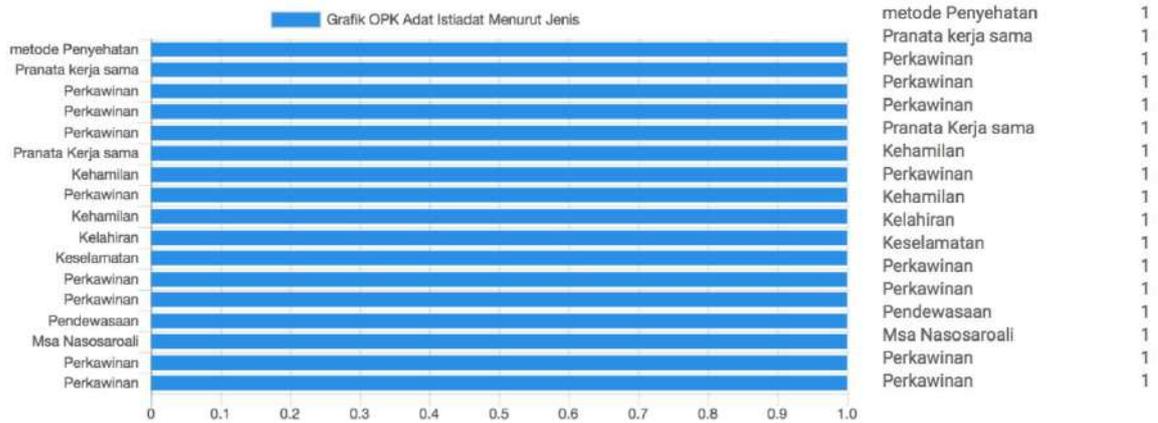
IV.3. Adat Istiadat

Tiga suku besar di Kabupaten Halmahera Timur yaitu Maba, Buli, dan togutil memiliki kebiasaan yang didasarkan pada nilai-nilai kehidupan yang disebut adat istiadat. Di dalam penelusuran dan hasil bacaan tabel di bawah terdapat 17 adat istiadat yang hingga kini masih aktif dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Halmahera Timur.

Dari jumlah objek adat istiadat di bawah, jumlah lembaga yang lingkup kegiatannya berhubungan dengan OPK tersebut ada tiga. Namun pada sarana pemerintas justru tidak terlihat satupun sarpras dari pemerintah yang ada di Kabupaten Halmahera Timur. Akan tetapi masyarakat menyediakan sarpras sebanyak 19 sarpras yang digunakan untuk OPK adat istiadat. Di Kabupaten Halmahera Timur juga tidak terdapat produk hukum yang membicarakan tentang perlindungan adat istiadat. Hal tersebut dapat dilihat di tabel stastik OPK Adat Istiadat di bawah.

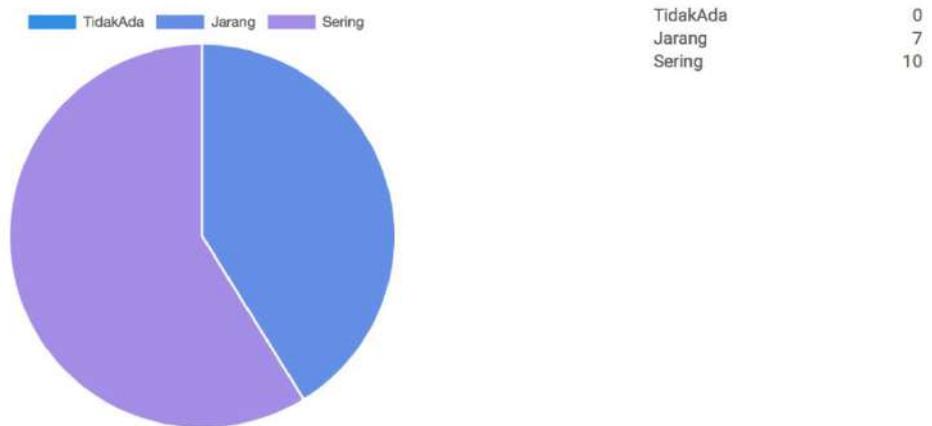
Dari grafik OPK Adat Istiadat menurut jenisnya, kita dapat menggambarkan bahwa jenis adat istiadat perkawinan berjumlah delapan. Sedangkan jenis kelahiran, kehamilan, kedewasaan hingga pranata kerja sama, masing-masing ada satu jenis yang tersebar pada tiga suku bangsa besar di Kabupaten Halmahera Timur. Pada grafik lainnya, yaitu grafik OPK menurut etnis, terdapat 10 OPK berada pada etnis Maba, Bicoli, dan lima OPK berada pada etnis Toguti, serta dua lainnya pada etnis Buli. Kesenuanya masih aktif dilakukan oleh masyarakatnya.

Jumlah Objek Adat istiadat		17
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	19
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		8



Menurut diagram OPK Adat Istiadat di bawah, frekuensi pelaksanaan adat istiadat sering dilakukan oleh masyarakat Halmahera Timur. Jumlah OPK adat istiadat yang sering dilakukan sebanyak 10 objek. Sedangkan tujuh objek lainnya sudah jarang dilakukan. Hal ini disebabkan karena pengaruh budaya luar yang masuk tanpa ada penyaringan dan langsung diadopsi oleh generasi muda. Kesemuanya masih aktif dan tidak ada yang tidak dilakukan oleh masyarakat halmahera Timur. Lihat diagram di bawah.

Diagram OPK Adat Istiadat Menurut Frekuensi Pelaksanaan



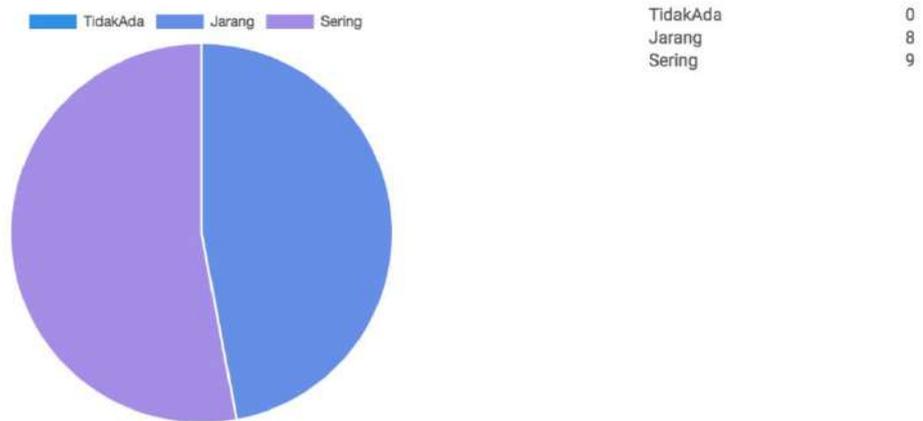
IV.4. Ritus

Jumlah objek pemajuan kebudayaan ritus di Kabupaten Halmahera Timur ada 17 OPK. Data statistik di bawah menunjukkan bahwa masyarakat Halmahera Timur hingga sekarang ini masih menerapkan kegiatan ritual di beberapa etnis. Namun lembaga atau organisasi yang lingkup kegiatannya berhubungan dengan OPK ritus belum ada. Padahal pada tabel di bawah masyarakat masih menyediakan sarpras untuk kegiatan ritual tersebut.

Berbeda dengan pemerintah di Kabupaten Halmahera Timur, mereka tidak menyediakan sarpras untuk kegiatan ritual. Begitu juga produk hukum, hingga saat ini tidak ada satupun produk hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi OPK ritus di Halmahera Timur.

Sama halnya dengan data statistik, menurut diagram frekuensi pelaksanaan OPK ritus, hanya ada sembilan objek ritus yang sering dilakukan oleh masyarakat Halmahera Timur. Tujuh objek lainnya sudah jarang dilakukan.

Jumlah Objek Ritus		17
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	6
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		16

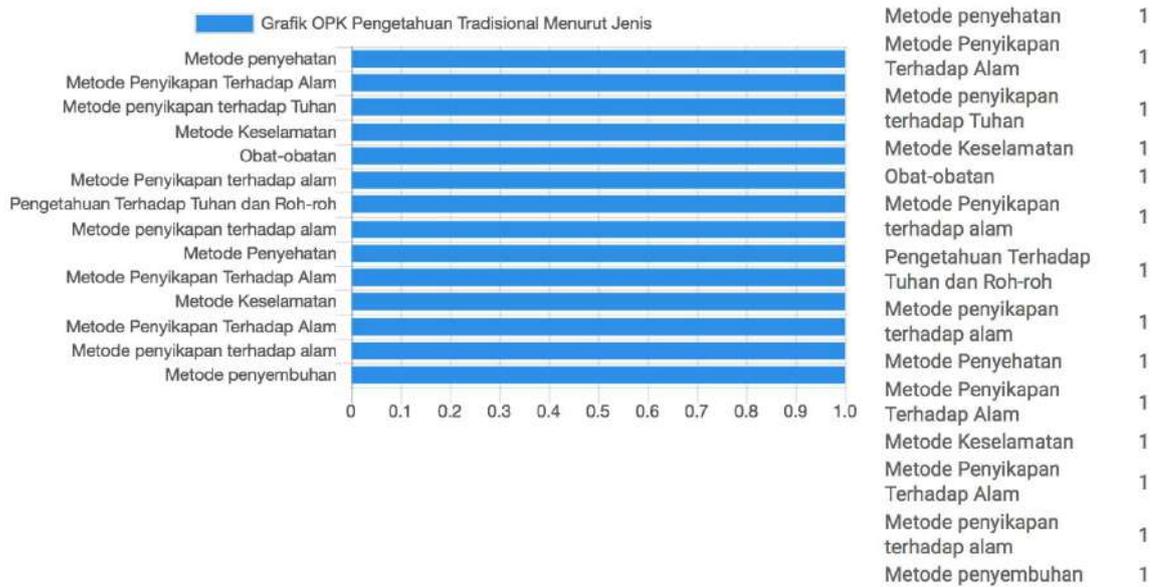


IV.5. Pengetahuan Tradisional

Berbagai pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Halmahera Timur telah dapat diklasifikasikan dan di data sesuai dengan jumlah objek pada tabel statistik di bawah. Sebanyak 14 OPK Pengetahuan tradisional yang sarprasnya disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Jumlah objek pengetahuan tradisional ini merupakan jumlah yang paling banyak dan masih dilaksanakan secara aktif oleh masyarakatnya. 11 sarpras disediakan oleh masyarakat sementara pemerintah tidak ada. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan tradisional untuk dilestarikan, belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah setempat. Terbukti tidak adanya produk hukum yang dibuat pemerintah untuk mengikat OPK dengan masyarakatnya.

Selain tabel di bawah, terdapat grafik OPK Pengetahuan Tradisional menurut jenis objek yang ada di Halmahera Timur. Grafik di bawah menggambarkan masing-masing objek Pengetahuan Tradisional memiliki jenis yang berbeda-beda pula.

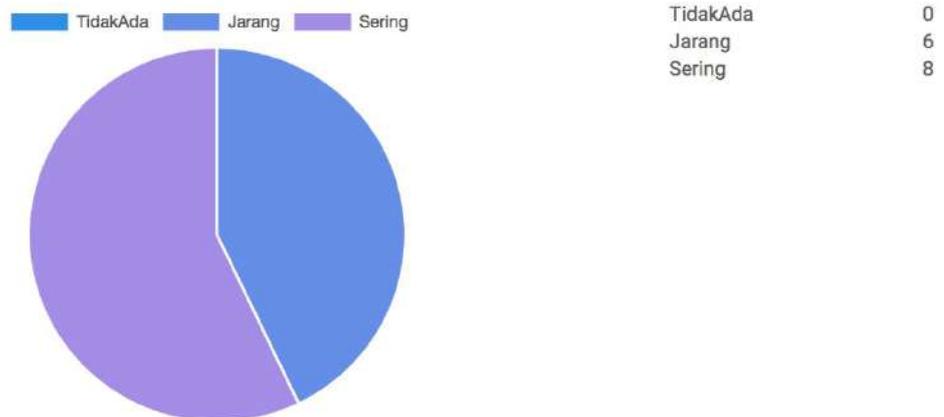
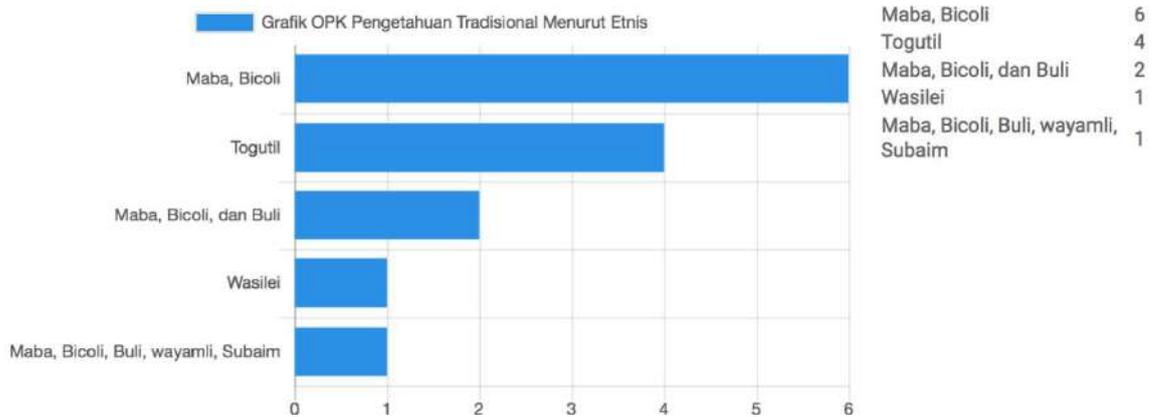
Jumlah Objek Pengetahuan Tradisional	14	
Jumlah Lembaga	0	
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	11
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum	0	
Jumlah Permasalahan	3	



Jika melihat grafik di bawah, gambarfan yang ditunjukkan bahwa beberapa etnis yang memiliki Pengetahuan Tradisional dengan pembagian sebagai berikut; etnis Maba dan Bicoli memiliki enam pengetahuan tradisional yang hingga kini masih sering dilakukan. Begitu halnya dengan etnis Togutil, terdapat empat objek Pengetahuan Tradisional yang dimilikinya. Selanjutnya etnis Buli, Wayamli, dan Subaim.

Keberlanjutan objek Pengetahuan Tradisional sebagai bagian dari mempertahankan nilai budaya masyarakat Halmahera Timur dapat dilihat pada diagram di bawah. Diagram di bawah menggambarkan frekuensi pelaksanaan OPK Pengetahuan sebanyak 14 OPK yang masih sering dilakukan oleh masyarakatnya. terdapat enam OPK Pengetahuan Tradisional yang sudah

jarang dilaksanakan. Namun masih ada delapan OPK yang sering dilaksanakan. Itupun dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai kebutuhan hidup masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur.

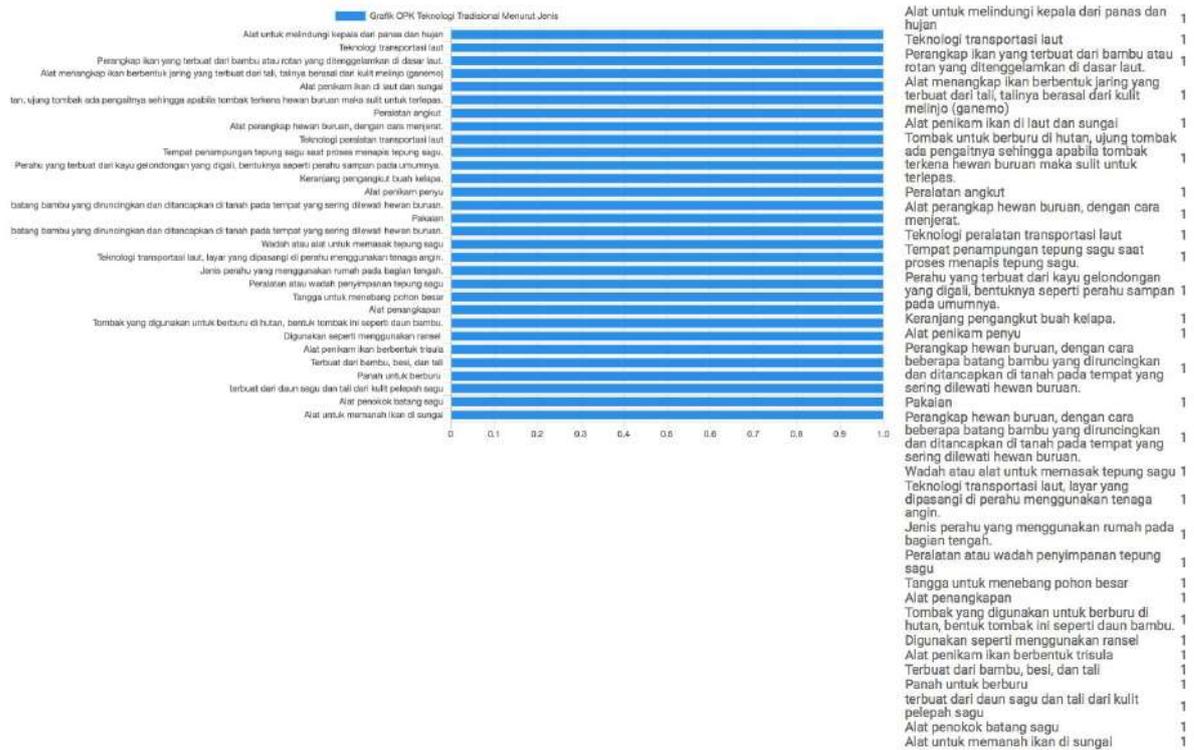


IV.6. Teknologi Tradisional

Dari hasil penelusuran data mengenai Teknologi Tradisional, Jumlah OPK Teknologi Tradisional di Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 25 OPK. Sebanyak 25 OPK yang di dapatkan dari penelusuran tersebut, terdapat juga dua lembaga yang lingkup kegiatannya berhubungan dengan objek Teknologi Tradisional. Sedangkan sarpras yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menggunakan sarana masyarakat Halmahera Timur.

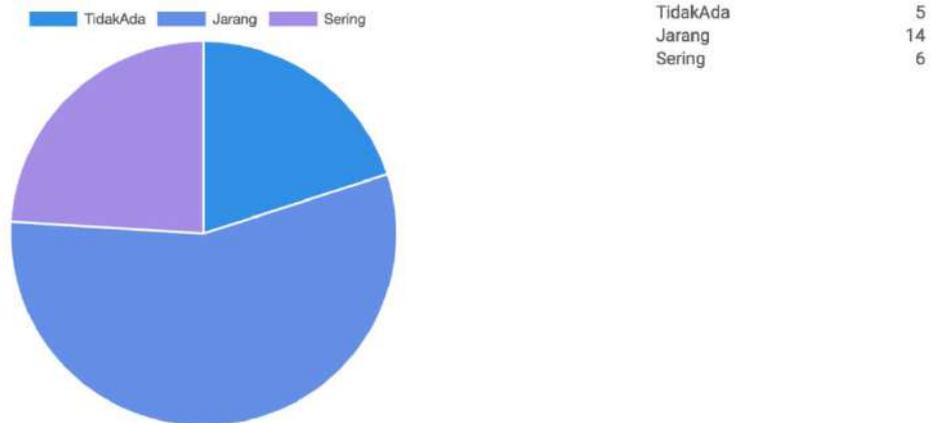
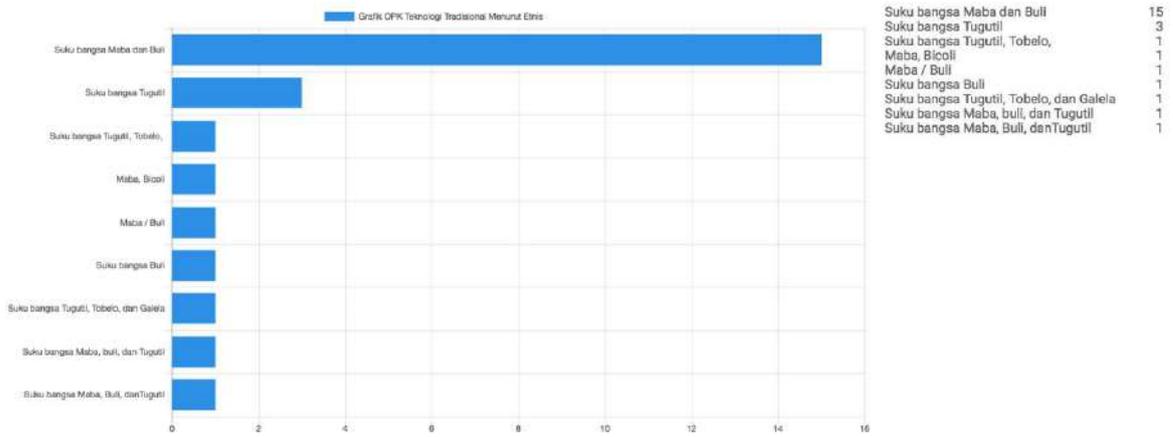
Jenis-jenis objek Teknologi tradisional yang ditemukan juga bervariasi dari jumlah yang terdapat pada tabel statistik di bawah. Data grafik yang di gambarkan menurut jenis teknologi tradisional, mulai dari peralatan Perkakas, Alat Transportasi hingga Senjata yang masih digunakan hingga saat ini.

Jumlah Objek Teknologi Tradisional		25
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	0
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		27



Etnis Maba dan Bicoli merupakan etnis yang memiliki Teknologi Tradisional terbanyak dari etnis lainnya di Kabupaten Halmahera Timur. Sedangkan pada etnis Togutil hanya memiliki tiga objek Teknologi Tradisional. Selanjutnya dimiliki oleh etnis kecil yang mendiami Halmahera Timur. Hal tersebut dapat dilihat di grafik OPK Teknologi Tradisional menurut etnit di bawah.

Beberapa OPK Teknologi Tradisional di Halmahera utara menurut frekuensi pelaksanaannya sudah tidak aktif lagi. Sebanyak lima objek Teknologi Tradisional sekarang ini tidak lagi dilaksanakan dan sebanyak 14 OPK sudah jarang dilakukan. Sedangkan 6 OPK lainnya hingga saat ini masih sering digunakan sebagai peralatan hidup masyarakat Halmahera Timur.

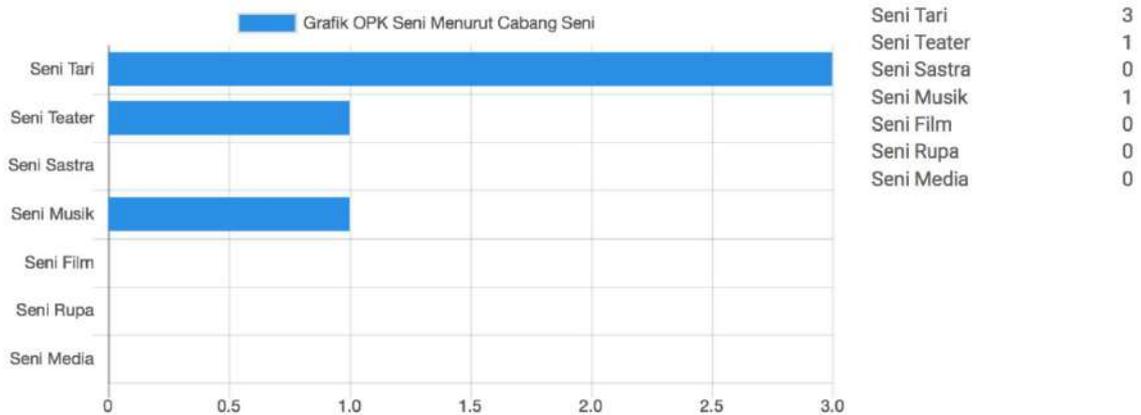


IV.7. Seni

Jumlah objek pemajuan kebudayaan Seni di Kabupaten Halmahera Timur sebanyak lima dari beberapa suku yang ada. Namun demikian, pemerintah telah menyediakan sarana untuk melakukan kegiatan seni sebanyak tiga sarana dan sarana lainnya disediakan oleh masyarakat. Hingga saat ini, belum ada lembaga atau organisasi yang lingkup kegiatannya berhubungan dengan seni di Halmahera Timur. Akan tetapi semangat untuk tetap melestarikan seni sangatlah tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari penyediaan sarpras dari masyarakat untuk kegiatan seni.

Pada grafik lainnya, data menggambarkan bahwa terdapat cabang seni yang berkembang di Halmahera Timur, antara lain; Seni Tari sebanyak tiga, seni Teater berjumlah satu, dan seni Musik berjumlah satu.

Jumlah Objek Seni	5	
Jumlah Lembaga	0	
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	7
	Sarana Pemerintah	3
Jumlah Produk Hukum	0	
Jumlah Permasalahan	5	



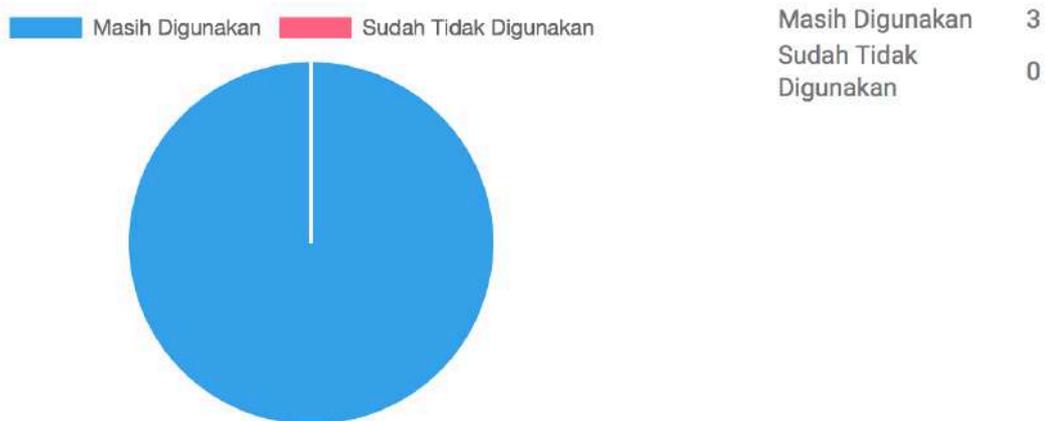
IV.8. Bahasa

Dari hasil bacaan tabel di bawah, Kabupaten Halmahera Timur terdapat berbagai suku bangsa yang hidup dan menetap untuk menjalani kehidupannya. Dari banyaknya suku bangsa yang ada di Halmahera Timur, terdapat juga tiga suku bangsa besar yang mendiami daerah tersebut, diantaranya suku bangsa Maba, Buli, dan Togutil. Tiga bahasa dari beberapa bahasa yang ada di Halmahera Timur tersebut, hingga sekarang ini masih aktif digunakan oleh masyarakatnya, baik itu Maba, Buli maupun Togutil. Dalam penelusuran data OPK bahasa di Kabupaten Halmahera Timur, semua masyarakatnya menggunakan aksara melayu.

Selain itu, di dalam tabel statistik OPK bahasa Kabupaten Halmahera Timur jumlah objek lembaga yang berhubungan dengan bahasa tidak ada sama sekali. Selain lembaga yang bergerak dibidang bahasa, terdapat juga jumlah sarana prasarana masyarakat dan produk hukum dari Pemerintah yang hingga sekarang belum ada. Padahal, ada empat sarana yang disediakan oleh pemerintah sebagai bagian dari pelestarian bahasa yang ada di Kabupaten Halmahera Timur. Seperti yang telah digambarkan pada tabel di bawah.

Penggunaan bahasa Maba, Buli, dan Togutil masih terlihat aktif di lingkungan masyarakat sehari-hari. Baik pada tingkat dewasa/orang tua maupun pada anak usia dini. Hal ini yang menyebabkan bahasa yang ada di Kabupaten Halmahera Timur tetap lestari dan terjaga.

Jumlah Objek Bahasa		3
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	0
	Sarana Pemerintah	4
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		2

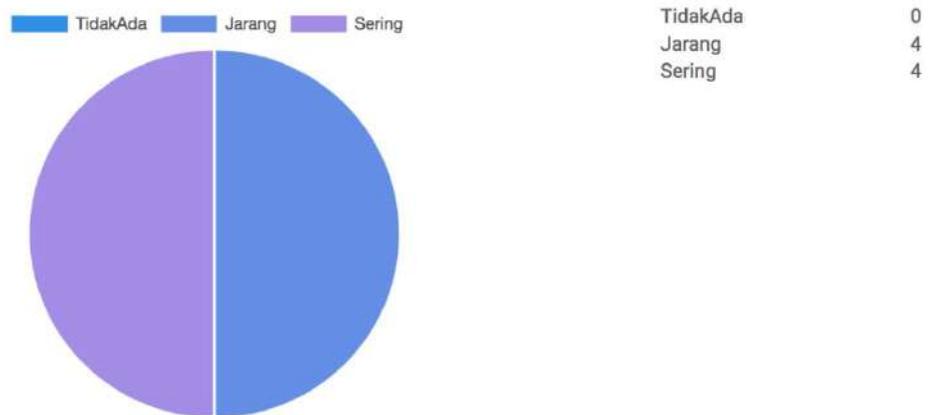
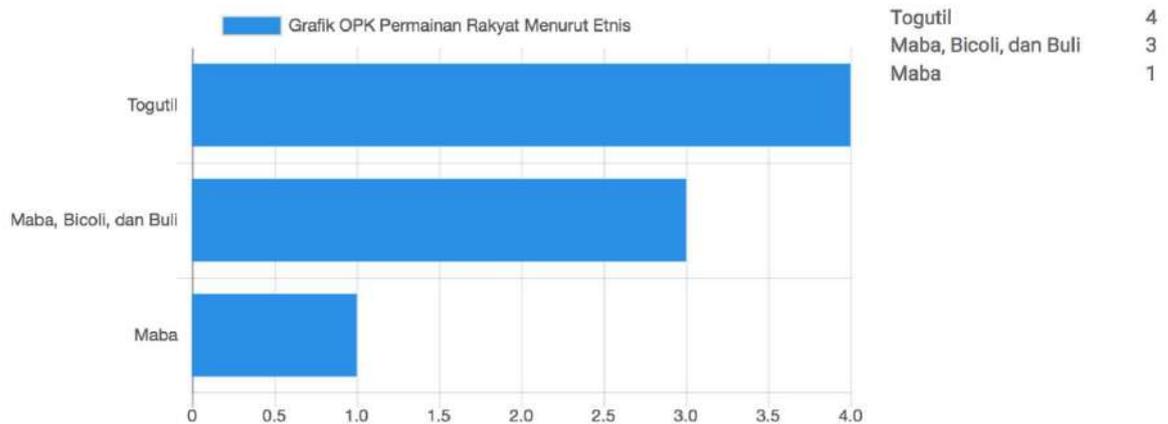


IV.9. Permainan Rakyat

Dari gambaran pada tabel di bawah, data statistik objek Permainan rakyat berjumlah delapan yang tersebar hampir di semua etnis di Kabupaten Halmahera timur. Sama halnya dengan OPK lainnya sebelumnya, lembaga atau organisasi yang berhubungan dengan Permainan Rakyat belm ada. Selain itu, tidak terdapat sarpras secara resmi yang disediakan oleh pemerintah. Namun masyarakat di Halmahera Timur tetap menyediakan lahan sebagai sarpras yang digunakan untuk oboek Permainan Rakyat.

Dari delapan objek Permainan rakyat, empat diantaranya dimiliki oleh etnis Togutil. Dan empat lainnya dimiliki oleh etnis maba, Buli dan Bicoli. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah. Kesemuanya hingga sekarang masih dapat dinikmati pada masyarakatnya. 50% objek Permainan Rakyat masih sering dilakukan oleh masyarakatnya, sedangkan 50% lainnya sudah jarang dilaksanakan.

Jumlah Objek Permainan Rakyat		8
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	11
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		8



IV.10. Olahraga Tradisional

Sepanjang pengumpulan data untuk penyusunan PPKD Kabupaten Halmahera Timur pada 2019, tidak ditemukan adanya OPK Olahraga Tradisional dalam kebudayaan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur.

Statistik OPK Olahraga Tradisional

Jumlah Objek Olahraga Tradisional	0	
Jumlah Lembaga	0	
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	0
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum	0	
Jumlah Permasalahan	0	

IV.11. Cagar Budaya

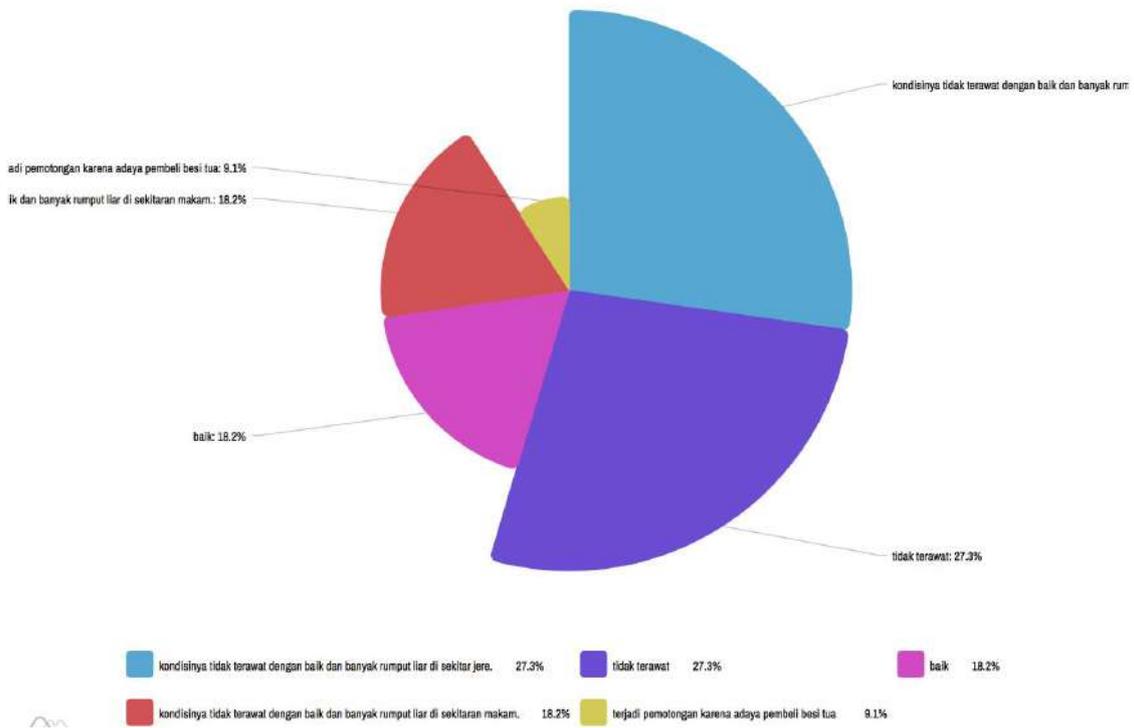
Kabupaten Halmahera Timur memiliki sebanyak sebelas OPK Cagar Budaya . Sejumlah OPK ini seharusnya dikelola oleh dua lembaga, yakni BPCB Maluku Utara dan instansi terkait di Kabupaten Halmahera Timur. Objek OPK Cagar Budaya di Kabupaten Halmahera Timur berbentuk bunker peninggalan Jepang, makam dan tempat keramat.

Tabel. Statistik OPK Cagar Budaya Kabupaten Halmahera Timur

Jumlah Objek Cagar Budaya		11
Jumlah Lembaga		2
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	9
	Sarana Pemerintah	19
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		9

Tabel. Nama Cagar Budaya , Penetapan, dan Keaktifannya di Kabupaten Halmahera Timur

#	Nama Cagar Budaya	Ditetapkan Oleh	Aktif
1	Bangker Pertahanan Jepang	Belum ditetapkan	✓
2	Rumah Iyan Toa	Belum ditetapkan	✓
3	Gereng Penembak Pesawat	Belum ditetapkan	✓
4	Makam Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah	Belum ditetapkan	✓
5	Jere Nurain	Belum ditetapkan	✓
6	Jere Madalamo	Belum ditetapkan	✓
7	Jere Momole Mancabo	Belum ditetapkan	✓
8	Benteng Kota Lama/Benteng Sangaji	Belum ditetapkan	✓
9	Jere Mobon	Belum ditetapkan	✓
10	Jere aikekmu	Warga	✓
11	Lolipiyai	Warga	✓



Gambar
Diagram OPK Cagar Budaya menurut Kondisi di Kabupaten Halmahera Timur

Pada umumnya kondisi OPK Cagar Budaya di Kabupaten Halmahera Timur dalam kondisi tidak terawat. Cagar Budaya makam dan jere banyak ditumbuhi rumput di sekitarnya. Kondisi semacam ini terdapat sebanyak 27 persen pada jere dan 18,2 persen pada makam. Hanya 18,2 persen Cagar Budaya di Kabupaten Halmahera Timur yang dinyatakan terawat.



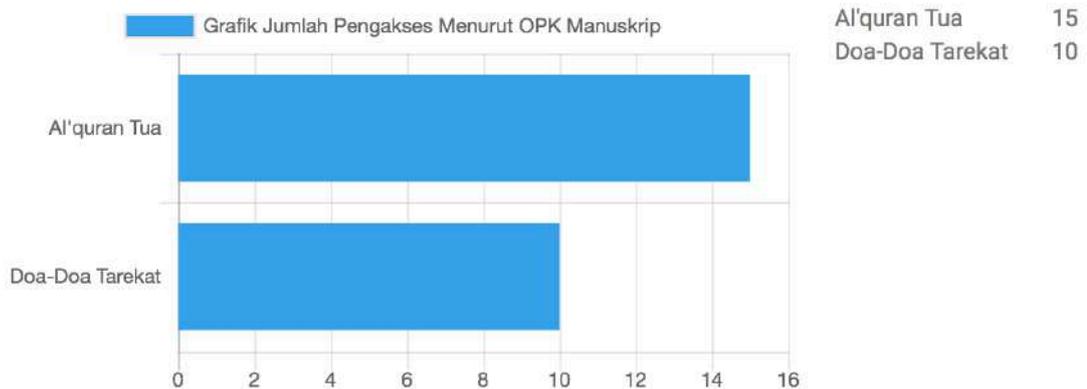
DATA
SUMBER DAYA MANUSIA
KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA
KEBUDAYAAN



V DATA SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN

V.1. Manuskrip

Kabupaten Halmahera Timur memiliki tiga jenis manuskrip, yakni Alquran tua, doa-doa tarekat, dan sertifikat kepemilikan tanah. Ketiga Manuskrip ini masih aktif. Sumber daya manusia untuk OPK Manuskrip ini sangat rendah sekali jumlahnya. Hal ini dapat dilihat dari pengakses yang sangat sedikit sekali jumlahnya. Misalnya untuk Alquran tua, hanya ada 15 orang dan doa-doa tarekat hanya 10 pengakses. Kondisi lembaga kebudayaan yang bergerak di bidang Manuskrip juga tidak ada.

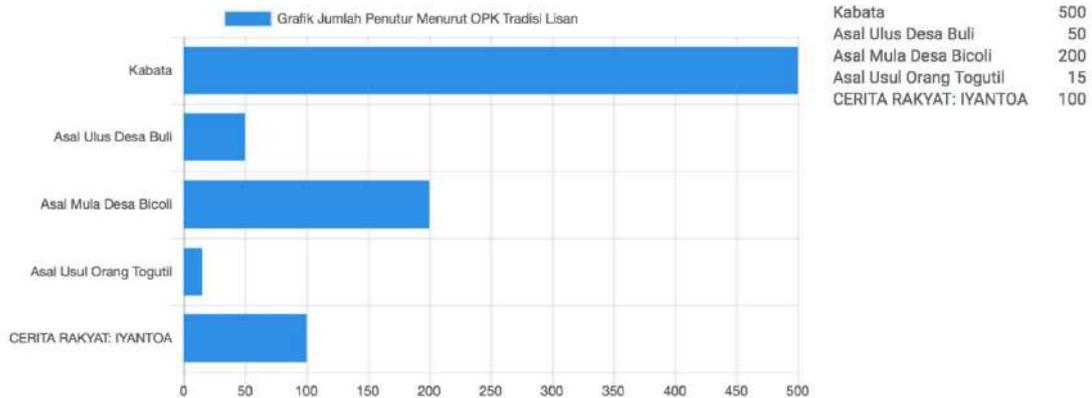


Gambar. Grafik jumlah lembaga menurut jumlah pengakses OPK Manuskrip di Kabupaten Halmahera Timur

V.2. Tradisi Lisan

Kabupaten Halmahera Timur memiliki objek yang sangat banyak yang berkaitan dengan OPK Tradisi Lisan. Jumlah OPK ini mencapai 500 objek yang dapat dikategorikan sebagai: Kabata sebanyak 500 objek, asal-usul Desa Buli

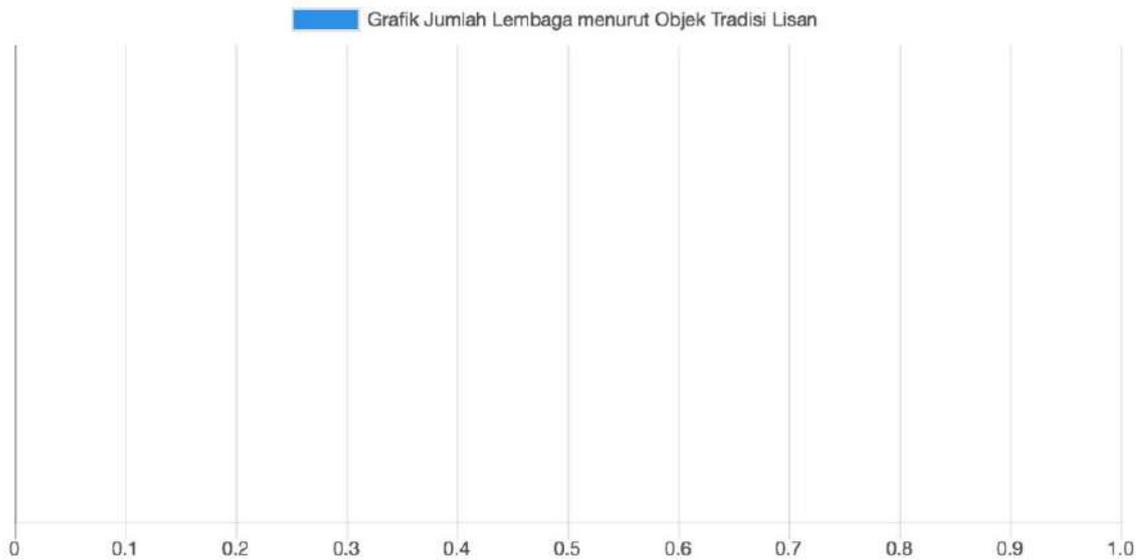
sebanyak 50 objek, asal mula Desa Bicoli sebanyak 200 objek, asal usul orang Togutil sebanyak 15 objek, dan cerita rakyat Iyantoa sebanyak 100 objek.



Gambar. Grafik jumlah penutur menurut OPK Tradisi Lisan di Kabupaten Halmahera Timur

Sumber daya manusia kebudayaan yang berkaitan dengan OPK Tradisi Lisan menunjukkan penurunan jumlah. Beberapa penutur tergolong pada usia tua. Hal ini disebabkan juga oleh adanya pandangan bahwa cerita rakyat, sebagai salah satu bentuk tradisi lisan, tidak bisa dituturkan secara bebas.

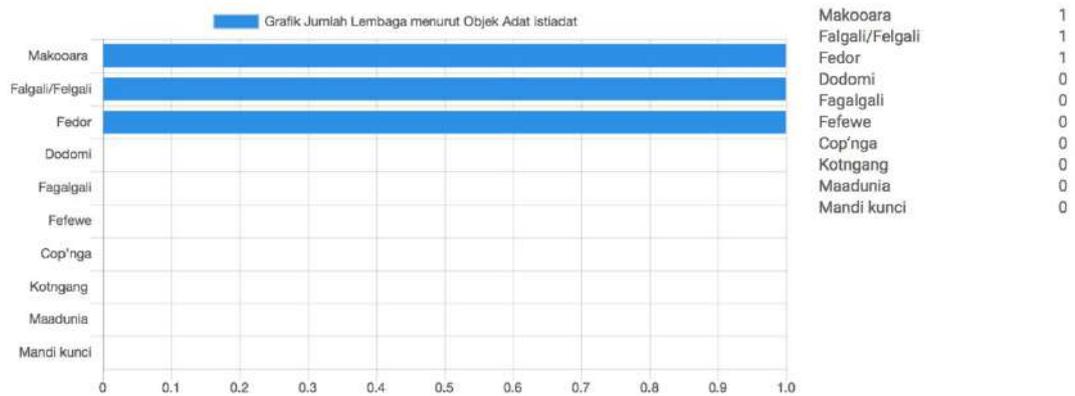
Tidak ada lembaga kebudayaan yang berkiatan dengan tujuan pemajuan kebudayaan ini di Kabupaten Halmahera Timur.



Gambar. Grafik jumlah lembaga menurut OPK Tradisi Lisan di Kabupaten Halmahera Timur

V.3. Adat Istiadat

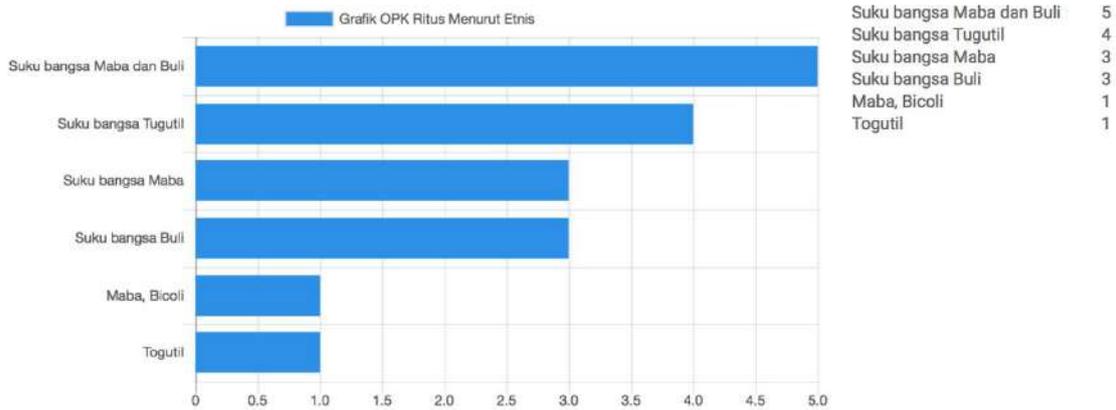
OPK Adat Istiadat di Kabupaten Halmahera Timur memiliki sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan. Sumber daya manusia ini terdapat banyak di masyarakat sebagai pelaku budaya, dan masih terus dipertahankan hingga saat ini. Lembaga kebudayaan juga demikian kondisinya, banyak terdapat di masyarakat. Hanya saja bentuknya tidak formal dengan program pemajuan yang sistematis dan terencana. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya objek pada OPK ini. Selain itu, masyarakat masih teguh mempertahankan sebagian besar tradisi dalam adat istiadat mereka.



Gambar. Grafik jumlah lembaga menurut OPK Adat Istiadat di Kabupaten Halmahera Timur

V.4. Ritus

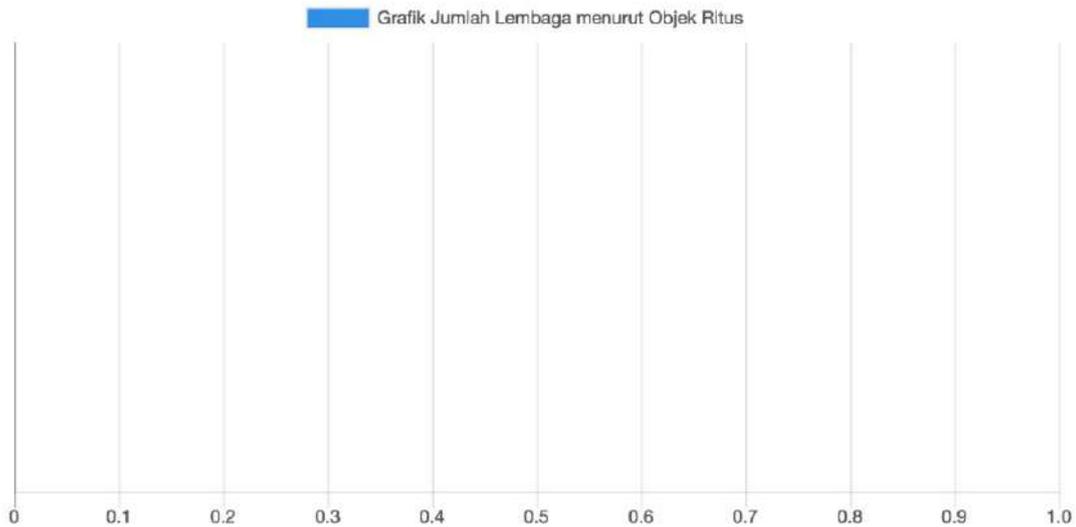
Etnis Maba, Bicoli, dan Togutil masih mempraktikkan berbagai ritus dalam kebudayaan mereka. Beberapa jenis Ritus tertentu dipraktikkan oleh lebih dari satu etnis, misalnya satu Ritus terdapat pada etnis Maba dan Bicoli. Berdasarkan etnis yang melaksanakan, Ritus dikelompokkan menurut pelaksanaannya, yakni etnis Maba, Buli, Maba dan Buli, Maba dan Bicoli, dan Togutil.



Gambar. Grafik OPK Ritus menurut Etnis di Kabupaten Halmahera Timur

Ritus dilakukan oleh etnis Maba dan Buli sebanyak 5 objek, etnis Togutil sebanyak 4 objek, etnis Maba dan Buli masing-masing sebanyak 3 objek, Maba dan Bicoli sebanyak 1 objek, dan Togutil sebanyak 1 objek.

Sumber daya manusia kebudayaan OPK Ritus di Kabupaten Halmahera Timur masih banyak. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan pada sistem keyakinan di balik Ritus. Keterkaitan yang kuat antara keyakinan ritus dengan praktik kehidupan sehari-hari menyebabkan masih banyaknya pelaku ritus. Meski demikian, memang tampak adanya penurunan jumlah pemimpin dalam pelaksanaan ritus. Dalam hal kelembagaan, di Kabupaten Halmahera Timur juga tidak terdapat lembaga yang secara formal ditunjukan untuk mengurus perihal ritus. Namun, masyarakat memiliki kelembagaan yang sebenarnya menangani masalah ritus.



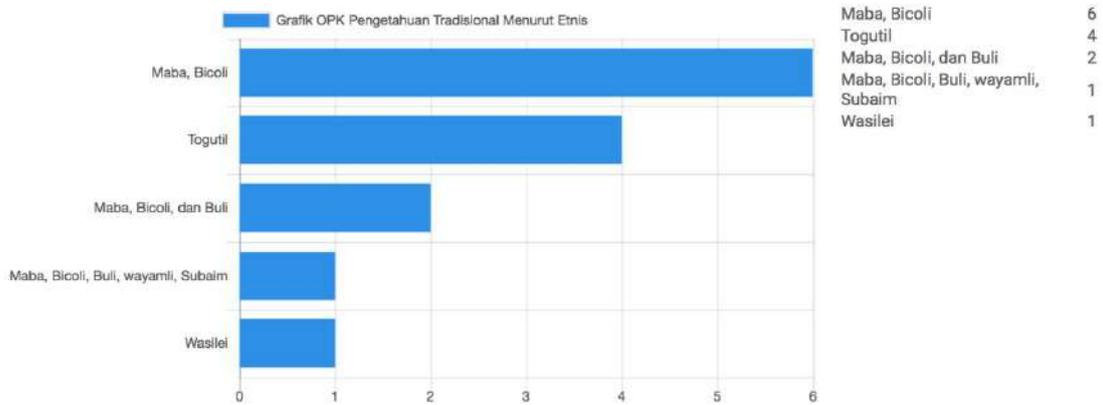
Gambar. Grafik jumlah lembaga menurut OPK Ritus di Kabupaten Halmahera Timur

V.5. Pengetahuan Tradisional

Masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur memiliki pengetahuan tradisional yang sangat banyak jumlahnya. Terbatasnya ingatan dan waktu untuk melakukan pengumpulan data secara detail menyebabkan jumlah objek pada OPK ini relatif terbatas jumlahnya. Berdasarkan data yang terkumpul untuk PPKD ini, terdapat sebanyak 14 objek Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Halmahera Timur.

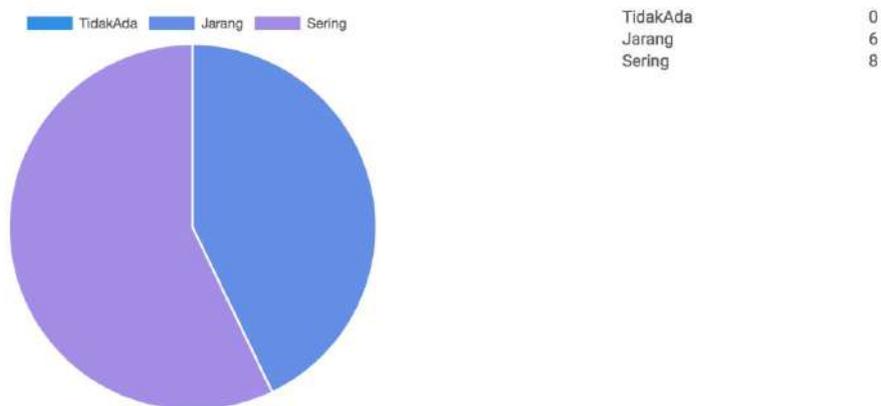
Sumber daya manusia kebudayaan untuk OPK ini masih ada berdasarkan pelakunya. Sebagian besar pengetahuan tradisional dikuasai atau diketahui oleh kalangan orang tua. Generasi muda sangat jarang yang mengetahui pengetahuan tradisional dalam masyarakat mereka. Terkait dengan lembaga kebudayaan, tidak ada yang berkaitan dengan OPK ini. Semua objek OPK ini masih dilaksanakan dalam tradisi masyarakat Halmahera Timur.

Jumlah Objek Pengetahuan Tradisional		14
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	11
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		3



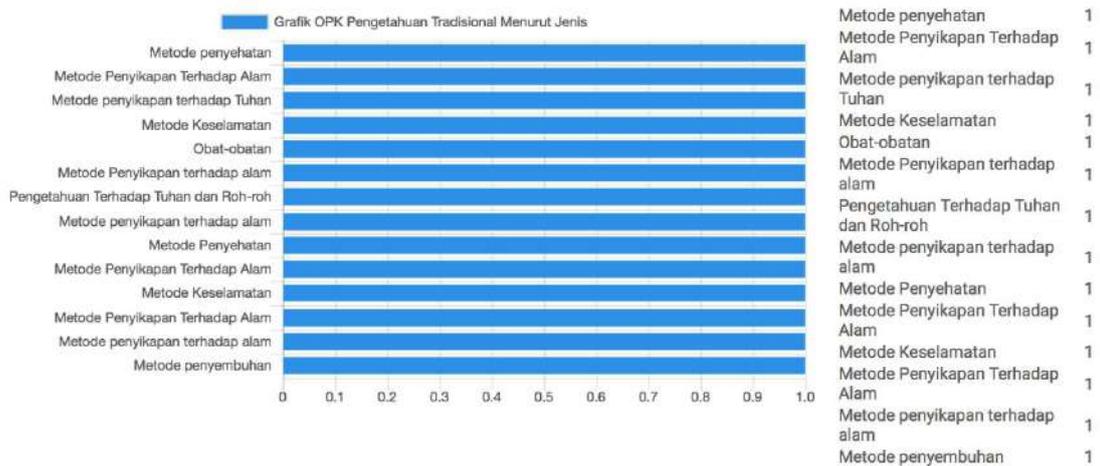
Gambar.

Grafik OPK Pengetahuan Tradisional menurut Etnis di Kabupaten Halmahera Timur



Gambar.

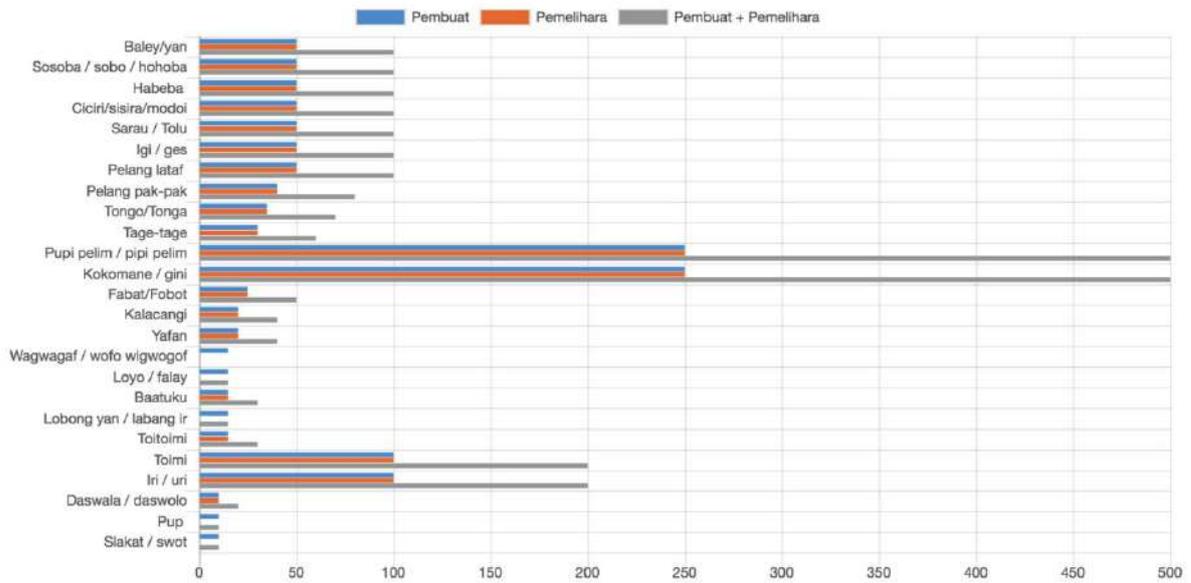
Diagram OPK Pengetahuan Tradisional menurut Frekuensi Pelaksanaan di Kabupaten Halmahera Timur



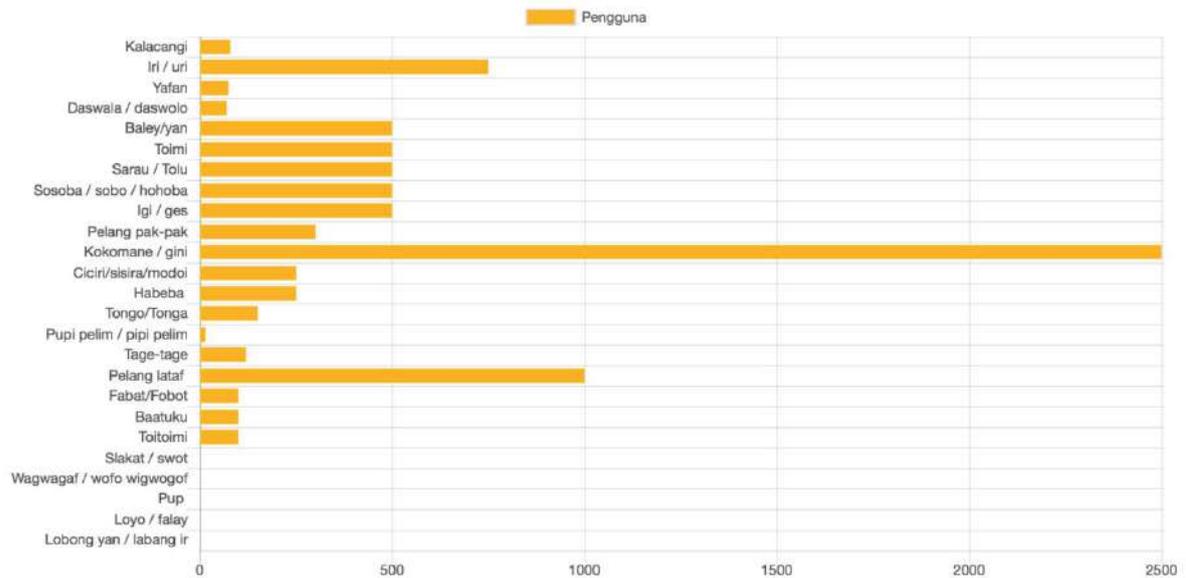
Gambar. Grafik OPK Pengetahuan Tradisional menurut Jenis di Kabupaten Halmahera Timur

V.6. Teknologi Tradisional

OPK Teknologi Tradisional di Kabupaten Halmahera Timur sangat banyak jumlahnya, yakni mencapai 25 objek. Teknologi yang masih banyak pelaku pembuat dan pemeliharanya adalah objek *pupi pelim/pipi pelim* dan *kokomane/gini*. Kedua objek OPK ini juga termasuk paling banyak pembuat dan pemeliharanya, yakni sekira 250-an orang. Sebaliknya, objek *pup* dan *slakat/swot* paling sedikit pembuat, pemelihara, dan pembuat dan pemeliharanya.



Gambar. Grafik Jumlah pelaku pemanfaatan Teknologi Tradisional

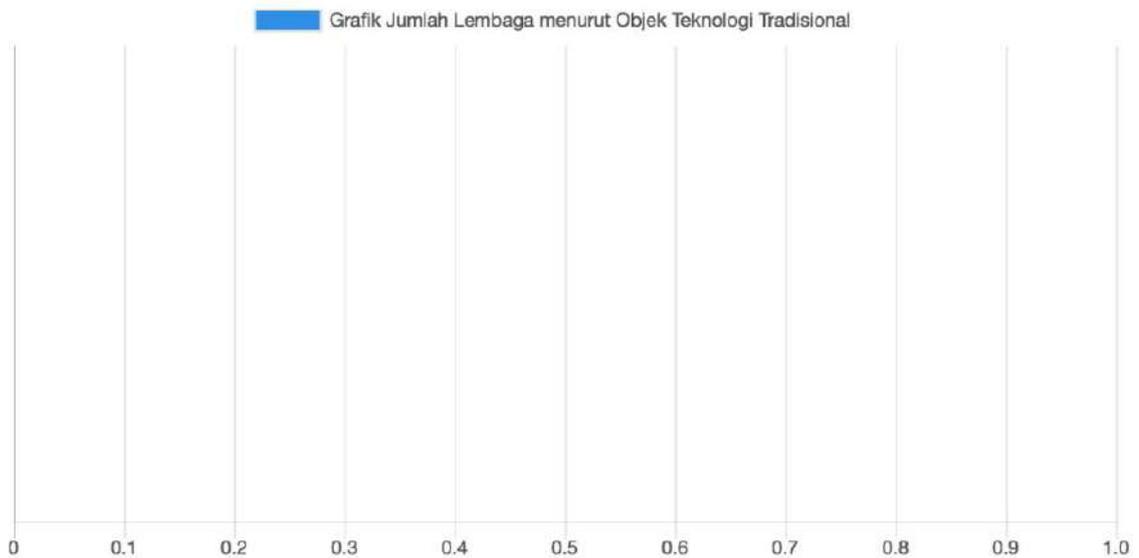


Gambar. Grafik pengguna OPK Teknologi Tradisional Kabupaten Halmahera Timur

Dari semua objek pada OPK Teknologi Tradisional, *komonae/gini* termasuk paling banyak penggunaannya. Diperkirakan sebanyak 2500an orang pengguna objek ini di Kabupaten Halmahera Timur. Sebaliknya, objek *slakat/swot*, *wagwagaf/wofo wigwogof*, *pup*, *loyo/falay*, dan *lobong yan/labang*, tergolong paling sedikit pembuat, pemelihara, dan pembuat dan pemeliharanya.

Data OPK Teknologi Tradisional menunjukkan bahwa sumber daya manusia kebudayaan objek masih cukup banyak dari sisi pembuat, pemelihara, dan pembuat dan pemeliharanya. Namun, hal ini berbeda dengan lembaga kebudayaan yang berkaitan dengan objek ini. Tidak ada lembaga yang berkaitan langsung dengan objek-objek dalam OPK ini.

	Pembuat	Pemelihara	Pembuat + P	Pengguna
Baley/yan	50	50	100	500
Sosoba / sobo / hohoba	50	50	100	500
Habeba	50	50	100	250
Ciciri/sisira/modoi	50	50	100	250
Sarau / Tolu	50	50	100	500
Igi / ges	50	50	100	500
Pelang lataf	50	50	100	1000
Pelang pak-pak	40	40	80	300
Tongo/Tonga	35	35	70	150
Tage-tage	30	30	60	120
Pupi pelim / pipi pelim	250	250	500	15.000
Kokomane / gini	250	250	500	2500
Fabat/Fobot	25	25	50	100
Kalacangi	20	20	40	80
Yafan	20	20	40	75
Wagwagaf / wofo wigwogof	15	0	0	0
Loyo / falay	15	0	15	0
Baatuku	15	15	30	100
Lobong yan / labang ir	15	0	15	0
Toitoimi	15	15	30	100
Toimi	100	100	200	500
Iri / uri	100	100	200	750
Daswala / daswolo	10	10	20	70
Pup	10	0	10	0
Slakat / swot	10	0	10	0



Gambar. Grafik jumlah lembaga OPK Teknologi Tradisional Kabupaten Halmahera Timur

V.7. Seni

Objek OPK Seni yang tercakup dalam pendataan PPKD Kabupaten Halmahera Timur pada 2019 sebanyak lima objek, yakni: *tarian lala*, *coka iba*, *janger Tobelo*, *tarian tide*, dan *tarian cakalele*. Pelaku dan pendukung kelima objek seni ini masih banyak, seperti tampak pada tabel berikut ini.

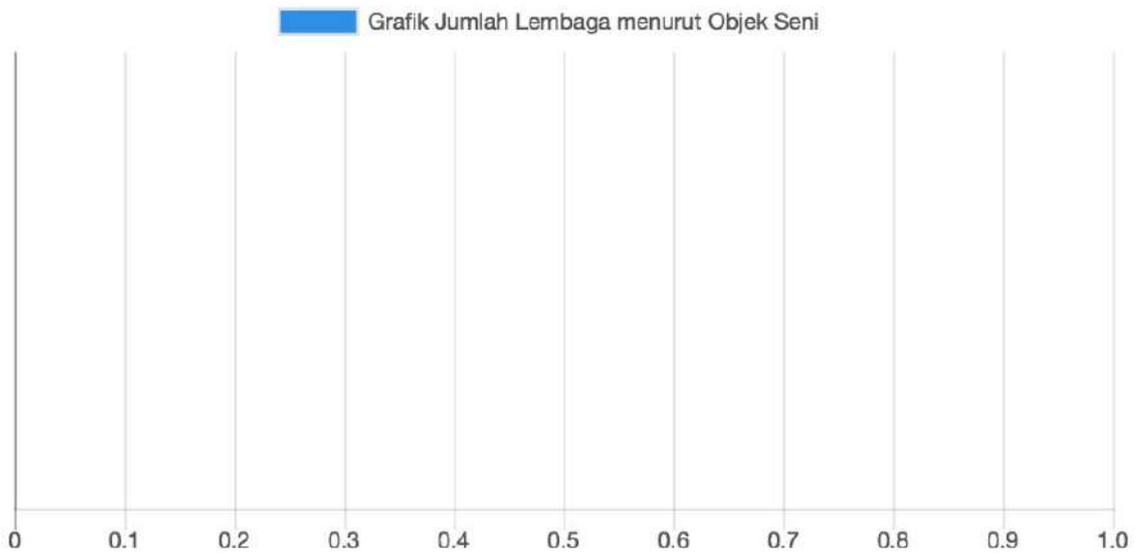
#	Nama Karya	Jumlah Pelaku Seni	Aktif
1	Tarian Lala	700	✓
2	Coka Iba	1000	✓
3	Janger Tobelo	700	✓
4	Tarian Tide	800	✓
5	Tarian Cakalele	300	✓

Ditinjau dari lembaga yang berkaitan dengan pemajuan OPK Seni di Kabupaten Halmahera Timur, ditemukan bahwa tidak lembaga dalam bidang ini.

Jumlah Objek Seni		5
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	7
	Sarana Pemerintah	3
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		5



Gambar. Grafik jumlah pelaku/pendukung OPK Seni Kabupaten Halmahera Timur

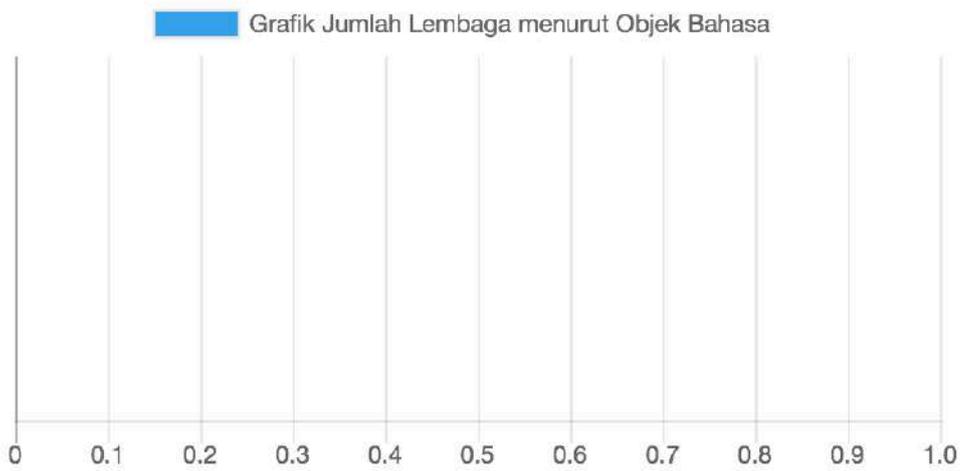


Gambar. Grafik jumlah lembaga menurut objek Seni Kabupaten Halmahera Timur

V.8. Bahasa

Sumber daya manusia kebudayaan pada OPK Bahasa di Kabupaten Halmahera Timur sebenarnya masih memadai, baik pada tingkatan pemerintah maupun masyarakat. Penutur ketiga bahasa dominan di Halmahera Timur masih banyak. Hanya saja tidak ada lembaga resmi (dari kalangan pemerintah) atau dari masyarakat yang bertujuan memajukan OPK ini.

Di antara ketiga bahasa di Kabupaten Halmahera Timur, Tidak ada lembaga yang secara khusus mengarah pada pemajuan OPK Bahasa ini. Hal ini berlaku untuk bahasa Buli, Maba, dan Togutil di Halmahera Timur.



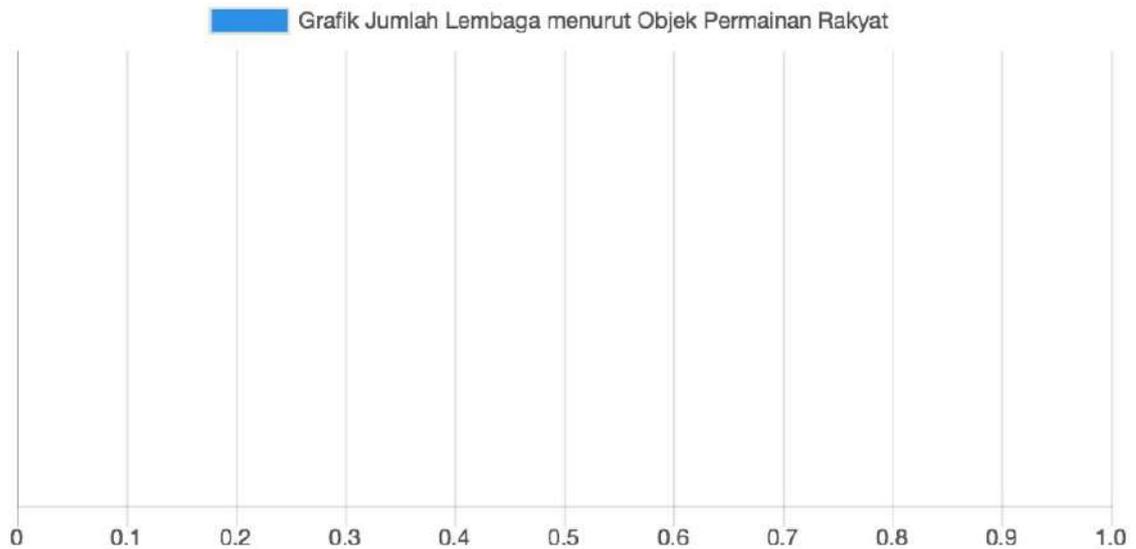
Gambar. Grafik jumlah lembaga menurut OPK Bahasa di Kabupaten Halmahera Timur

V.9. Permainan Rakyat

OPK Permainan Rakyat di Kabupaten Halmahera Timur ditemukan sebanyak delapan jenis, yakni *jilo-jilo*, *kuti kelereng*, *bek-bek*, *cege-cege*, *do du lulu*, *gumi gumini*, *torobe*, dan *yo maho hakai*. Permainan ini masih dipraktikkan di kalangan masyarakat Kabupaten Halmahera Timur. Dengan demikian, sumber daya manusia kebudayaan objek ini masih ada. Sebaliknya, lembaga kebudayaan berkaitan dengan objek ini tidak ada.

#	Permainan Rakyat	Etnis	Aktif
1	<u>jilo-jilo</u>	Maba, Bicoli, dan Buli	✓
2	<u>Kuti Kelereng</u>	Maba, Bicoli, dan Buli	✓
3	<u>Bek-bek</u>	Togutil	✓
4	<u>Cenge-Cenge</u>	Maba, Bicoli, dan Buli	✓
5	<u>Do Du Lulu</u>	Togutil	✓
6	<u>Gumi Gumini</u>	Togutil	✓
7	<u>Torobe</u>	Maba	✓
8	<u>Yo Maho Hakai</u>	Togutil	✓

Jumlah Objek Permainan Rakyat		8
Jumlah Lembaga		0
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	11
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		8



Gambar. Grafik jumlah lembaga menurut OPK Permainan Rakyat di Kabupaten Halmahera Timur

V.10. Olahraga Tradisional

OPK Olahraga Tradisional merupakan satu-satunya OPK yang tidak ada objeknya di Kabupaten Halmahera Timur. Beberapa aktivitas kebudayaan yang mengarah pada kebugaran fisik, tetapi tidak semata ditujukan untuk maksud ini, tergolong ke dalam OPK Permainan Tradisional.

Jumlah Objek Olahraga Tradisional	0	
Jumlah Lembaga	0	
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	0
	Sarana Pemerintah	0
Jumlah Produk Hukum	0	
Jumlah Permasalahan	0	

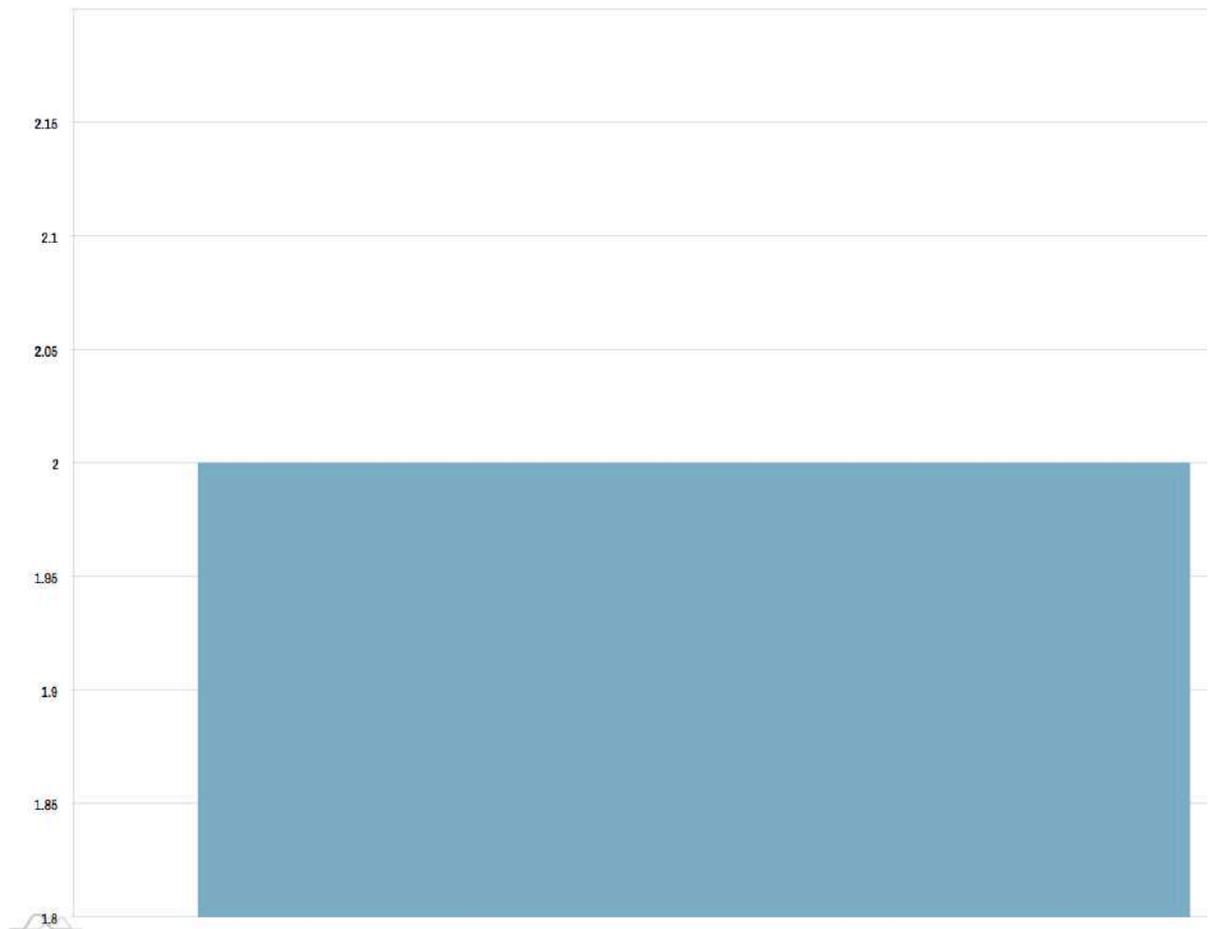


Gambar. Grafik jumlah lembaga menurut OPK Olahraga Tradisional di Kabupaten Halmahera Timur

V.11. Cagar Budaya

Secara statistik, jumlah OPK Cagar Budaya mencapai sebanyak 11 objek. Sejumlah objek ini memiliki dua lembaga yang terkait dengan OPK Cagar Budaya. Sumber daya manusia objek ini semuanya tergolong sebagai pemerintah. Kondisi ini juga serupa dengan lembaga kebudayaan di Kabupaten Halmahera Timur yang berkaitan dengan OPK Cagar Budaya. lembaga dimaksud meliputi Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara dan dinas terkait di Kabupaten Halmahera Timur.

Jumlah Objek Cagar Budaya		11
Jumlah Lembaga		2
Jumlah Sarana dan Prasarana	Sarana Masyarakat	9
	Sarana Pemerintah	19
Jumlah Produk Hukum		0
Jumlah Permasalahan		9



Gambar. Grafik jumlah lembaga menurut OPK Cagar Budaya di Kabupaten Halmahera Timur



**DATA
SARANA DAN PRASARANA
KEBUDAYAAN**

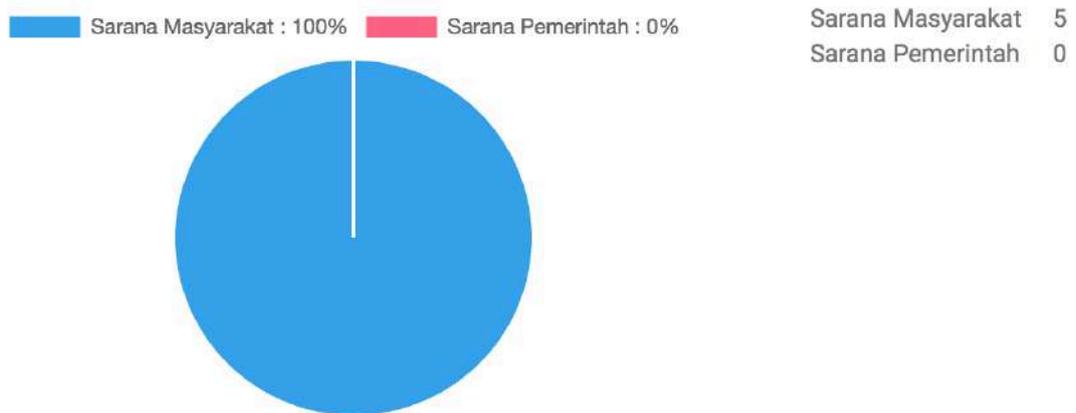


VI

DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

VI.1. Manuskrip

Sarana dan prasarana (sarpras) yang terdapat di Kabupaten Halmahera sebagai menunjang aktivitas objek pemajuan kebudayaan (OPK) Manuskrip, berjumlah 5 (lima) sarpras. Sarpras tersebut adalah milik masyarakat berupa rumah warga. Sementara sarpras pemerintah dan organisasi masyarakat untuk menunjang aktivitas dilingkup kegiatannya berhubungan dengan OPK Manuskrip tidak ditemukan di Kabupaten Halmahera Timur.

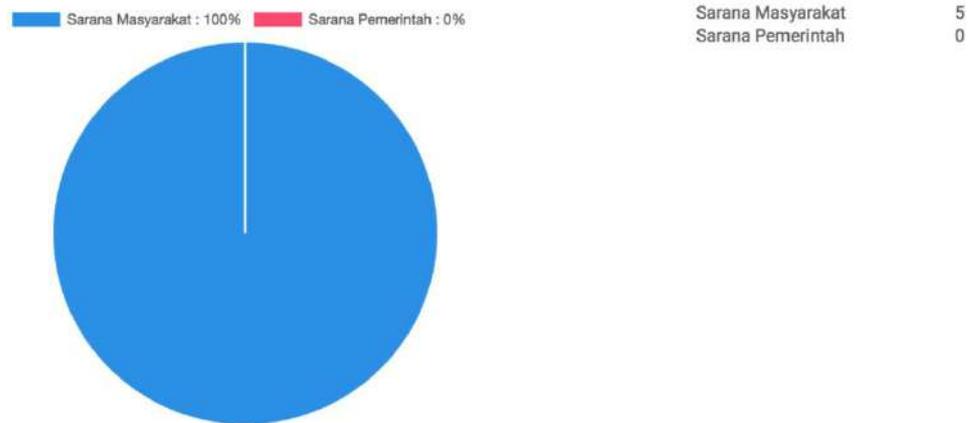


Gambar
Diagram persentase sarana dan prasarana yang mendukung
OPK Manuskrip di Kabupaten Halmahera Timur.

VI.2. Tradisi Lisan

Sarana prasarana (sarpras) yang mendukung OPK Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 5 (lima) sarpras.

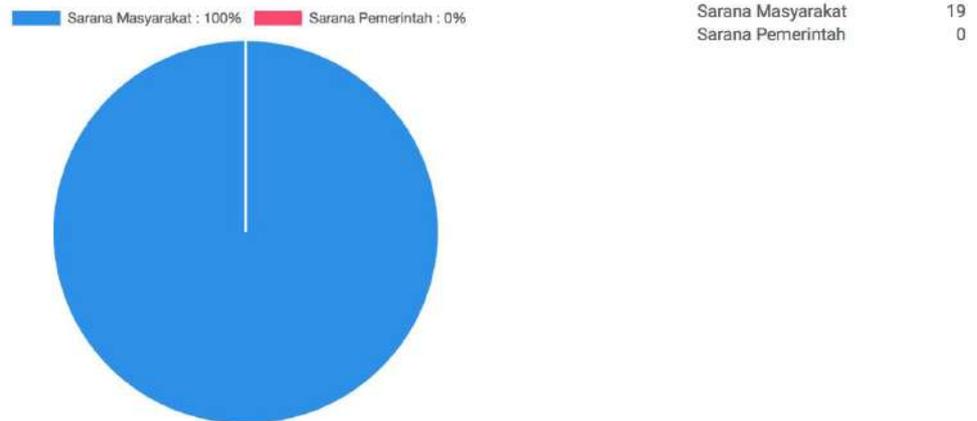
Sarpras tersebut adalah milik masyarakat berupa rumah warga, balai pertemuan dan pasar tradisional. Sementara, untuk sarpras pemerintah dan organisasi yang lingkup kegiatannya berhubungan dengan OPK Tradisi Lisan tidak ditemukan di Kabupaten Halmahera Timur.



Gambar
Diagram persentase sarana dan prasarana yang mendukung OPK Tradisi Lisan di Kabupaten Halmahera Timur.

VI.3. Adat Istiadat

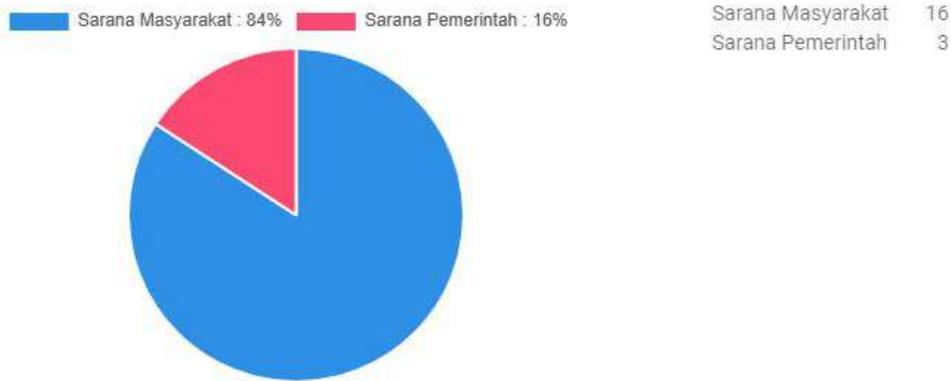
Sarana dan prasarana (sarpras) yang mendukung OPK Adat Istiadat yang terdapat di Kabupaten Halmahera Timur berjumlah 19 (sembilan belas) sarpras. Dari sembilan belas sarpras tersebut semuanya milik masyarakat berupa rumah warga, kebun warga, balai pertemuan, rumah adat dan lingkungan pekarangan warga. Sementara, sarpras pemerintah dan organisasi yang lingkup kegiatannya berhubungan dengan OPK Adat Istiadat di Kabupaten Halmahera Timur berjumlah 3 (tiga) lembaga.



Gambar
Diagram persentase sarana dan prasarana yang mendukung
OPK Adat Istiadat di Kabupaten Halmahera Timur

VI.4. Ritus

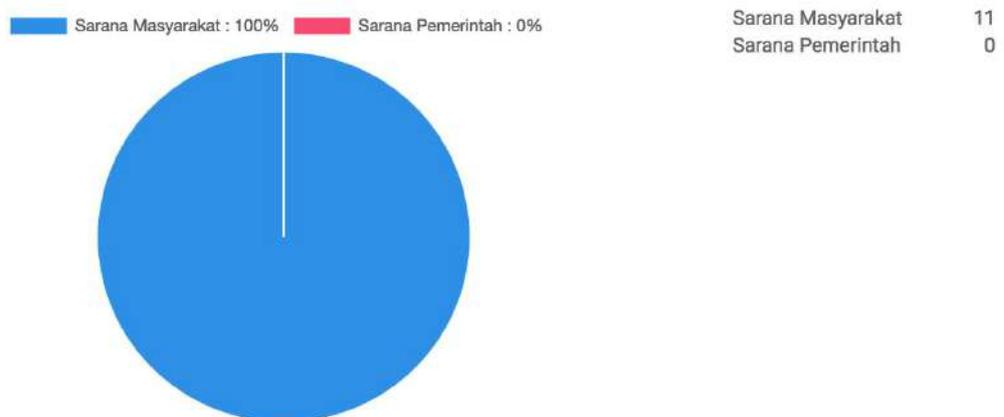
Jumlah sarana dan prasarana (sarpras) di Kabupaten Halmahera Timur yang mendukung OPK Ritus sebanyak 19 (sembilan belas) sarpras. Sebanyak 16 (enam belas) sarpras milik masyarakat berupa rumah warga, rumah wonge, kebun warga dan masjid. Untuk sarpras Pemerintah berjumlah 3 (tiga) sarpras yang terdiri Sekolah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan. Sementara, organisasi yang lingkup kegiatannya berhubungan dengan OPK Ritus yang ditemukan di Kabupaten Halmahera Timur berjumlah 3 (tiga) lembaga.



Gambar
Diagram persentase sarana dan prasarana yang mendukung OPK Ritus di Kabupaten Halmahera Timur

VI.5. Pengetahuan Tradisional

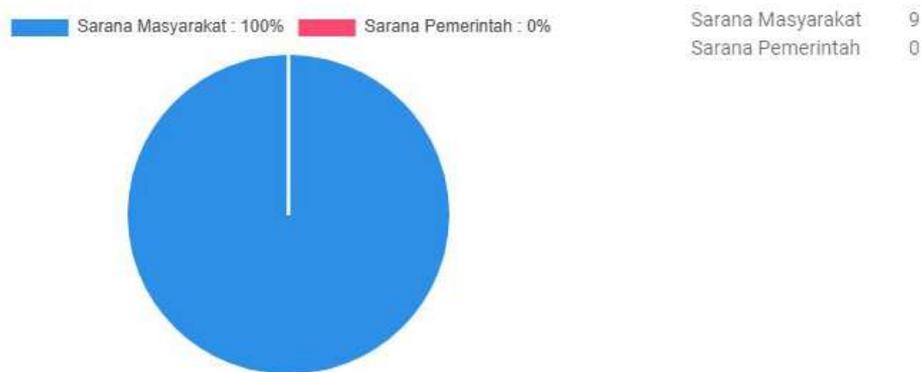
Sarana prasarana (sarpras) yang mendukung OPK Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 11 (sebelas) sarpras. Sarpras tersebut adalah milik masyarakat berupa rumah warga dan balai. Sementara sarpras milik pemerintah yang mendukung organisasi kemasyarakatan yang lingkup kegiatannya berhubungan dengan OPK Pengetahuan Tradisional tidak ditemukan di Kabupaten Halmahera Timur.



Gambar
Diagram persentase sarana dan prasarana yang mendukung OPK Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Halmahera Timur.

VI.6. Teknologi Tradisional

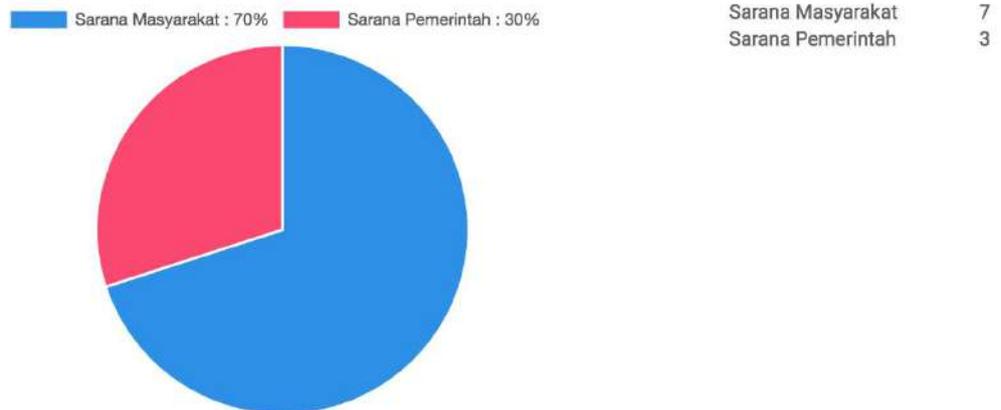
Sarana prasarana (sarpras) yang mendukung OPK Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 9 (sembilan) sarpras. Sarpras tersebut adalah milik masyarakat berupa rumah warga sebanyak 9 sarpras dan tidak terdapat sarpras milik pemerintah. Sementara lembaga atau organisasi lingkup kegiatannya berhubungan dengan OPK Teknologi Tradisional di Kabupaten Halmahera Timur hanya terdapat 2 (dua) lembaga.



Gambar
Diagram persentase sarana dan prasarana yang mendukung
OPK Teknologi Tradisional di Kabupaten Halmahera Timur

VI.7. Seni

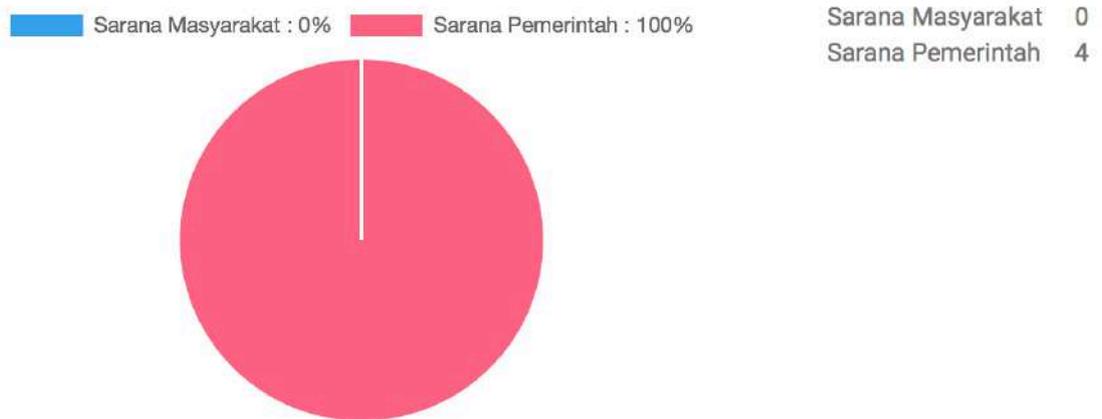
Jumlah Sarana dan prasarana (sarpras) di Kabupaten Halmahera Timur yang mendukung OPK Seni berjumlah, 10 (sepuluh) sarpras. Sarpras masyarakat berjumlah 7 (tujuh) yang terdiri dari rumah warga, balai pertemuan, dan tempat pertunjukan. Sementara untuk sarpras pemerintah berjumlah 3 (tiga) sarpras yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Sekolah. Untuk oraginasi masyarakat yang menunjang OPK Seni tidak ditemukan di Kabupaten Halmahera Timur.



Gambar
Diagram persentase sarana dan prasarana yang mendukung
OPK Seni di Kabupaten Halmahera Timur

VI.8. Bahasa

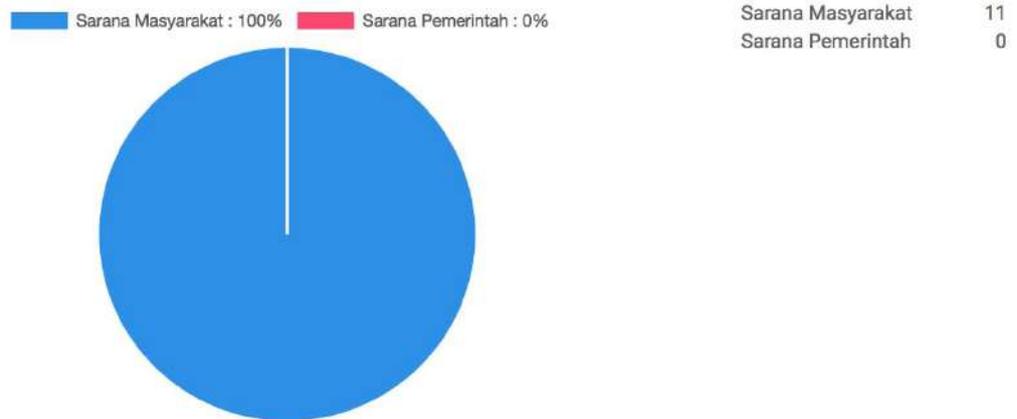
Sarana dan prasarana (sarpras) yang terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai menunjang aktivitas objek pemajuan kebudayaan (OPK) Bahasa, berjumlah 4 (empat) sarpras. Sarpras tersebut adalah milik pemerintah, berupa Sekolah-Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur. Sementara sarpras masyarakat kegiatannya berhubungan dengan OPK Bahasa tidak ditemukan di Kabupaten Halmahera Timur.



Gambar
Diagram persentase sarana dan prasarana yang mendukung
OPK Bahasa di Kabupaten Halmahera Timur

VI.9. Permainan Rakyat

Sarana prasaran (sarpras) yang mendukung OPK Permainan Rakyat sebanyak 11 (sebelas) sarpras. Sarpras tersebut semuanya milik masyarakat berupa rumah warga yang terdiri dari lapangan terbuka, pekarangan warga, tempat terbuka dan pantai. Sementara untuk sarpras pemerintah dan organisasi lingkup kegiatannya berhubungan dengan OPK Permainan Rakyat tidak ditemukan di Kabupaten Halmahera Timur.



Gambar
Diagram persentase sarana dan prasarana yang mendukung OPK Permainan Rakyat di Kabupaten Halmahera Timur

VI.10. Olahraga Tradisional

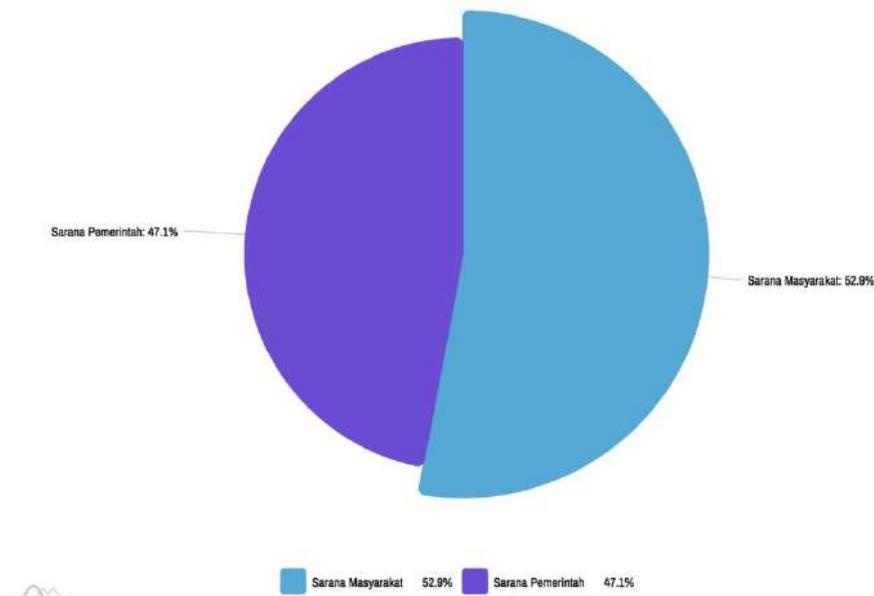
Tidak ada sarana dan prasarana (sarpras) yang mendukung OPK Olahraga Tradisional yang ditemukan di Kabupaten Halmahera Timur, baik itu sarpras masyarakat, pemerintah maupun organisasi lingkup kegiatannya berhubungan dengan OPK Olahraga Tradisional.



Gambar
Diagram persentase sarana dan prasarana yang mendukung OPK Olahraga Tradisional di Kabupaten Halmahera Timur

VI.11. Cagar Budaya

Jumlah Sarana dan prasarana (sarpras) OPK Cagar Budaya di Kabupaten Halmahera Timur, berjumlah 28 (dua puluh delapan) sarpras. Sarpras milik masyarakat berjumlah 9 (sembilan) dan 19 (sembilan belas) sarpras milik pemerintah. Untuk organisasi masyarakat yang mendukung OPK Cagar Budaya tidak terdapat di Kabupaten Halmahera Timur.



Gambar
Diagram persentase sarana dan prasarana yang mendukung OPK Cagar Budaya di Kabupaten Halmahera Timur



**PERMASALAHAN
DAN
REKOMENDASI**



VII PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

VII.1 Permasalahan dan Rekomendasi

VII.1.1. MANUSKRIP

NO.	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TUJUAN	SASARAN	TAHAPAN KERJA	INDIKATOR CAPAIAN			
						2024	2029	2034	2039
1	Manuskrip sebagian besar masih tersebar di masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi sebaran manuskrip - Sosialisasi pentingnya manuskrip dilindungi. 	Menyelamatkan manuskrip yang tersebar di masyarakat dan mengantisipasi dari kerusakan secara total.	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak keluarga kesultanan - Masyarakat - Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan digitalisasi - Memasang katalogisasi manuskrip - Membedah khazanah - Membuat perpustakaan digital. 	100% manuskrip telah teridentifikasi. Masyarakat dapat mengakses manuskrip	100% manuskrip dapat diakses di perpustakaan digital.	100% pengembangan perpustakaan manuskrip di perpustakaan.	100% pengembangan manuskrip berbasis digital secara <i>online</i> .

2	Tidak ada tenaga ahli pembaca manuskrip berbahasa arab gundul dan bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia	Menerjemahkan manuskrip ke dalam bahasa Indonesia	Memahami kandungan cerita yang terdapat dalam manuskrip.	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak keluarga kesultanan - Masyarakat - Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan manuskrip - Melakukan pelatihan membaca manuskrip - Melakukan digitalisasi - Memasang katalogisasi manuskrip - Membedah khazanah - Membuat perpustakaan digital. - Merawat manuskrip secara berkala. 	80% manuskrip telah diterjemahkan. Masyarakat dapat mengakses manuskrip	100 % terjemahan manuskrip telah digitalisasi dan disebarakan di perpustakaan.	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % manuskrip telah mendapat tempat khusus. - Telah terdapat tenaga ahli pembaca manuskrip . 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % manuskrip yang telah di terjemhakan dan digitalisasi dapat diakses oleh masyarakat secara manual maupun <i>online</i>.
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--



VII.1.2. TRADISI LISAN

NO.	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TUJUAN	SASARAN	TAHAPAN KERJA	INDIKATOR CAPAIAN			
						2024	2029	2034	2039
1	Penutur tradisi lisan semakin berkurang dan hanya terbatas pada kalangan orang tua.	Memperkenalkan tradisi lisan berbasis kurikulum MULOK mulai pada tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas.	Proses pewarisan berjalan sesuai dengan yang diharapkan agar bertambah jumlah penutur tradisi lisan dikalngan anak muda.	<ul style="list-style-type: none"> - Toko adat - Penutur - Masyarakat - Pemerinta - Anak-anak - Sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendokumntasian tradisi lisan ke dalam bentuk narasi, audio dan video - Kategorisas i jenis tradisi lisan - Menyusus kurikulum muatan lokal di tingakt sekolah. 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% bentuk dan jenis tradisi lisan telah teridentifikasi. - 100% tradisi lisan terpublikasi melalui bahan ajar di sekolah. - 50 % pendokumntasian mengunakan 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% jenis tradisi lisan telah terpblikasi , baik secara tertulis, audio dan video - Pengembangan tradisi lisan melalui tulisan, audio dan video di sekolah, kampung baca milik desa, kelurahan dan 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% sekolah mendapat kan buku berisi tradisi lisan. - 100 % setiap sekolah menerapk an kurikulum muatan lokal di tingkat sekolah. 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% tradisi lisan terdokumentasi - 100 % setiap sekolah mendapat kan buku tradisi lisan dan menjadi bahan ajar - 100 % Pengembangan tradisi lisan melalui tulisan, audio dan video di sekolah.



						audio dan video	komunitas budaya.		kampung baca milik desa, kelurahan dan komunitas budaya.
2	Generasi muda tidak tertarik lagi dengan tradisi lisan	Perlu adanya pola pewarisan yang membuat generasi muda tertarik dengan tradisi lisan	Meningkatkan pemahaman tradisi lisan pada kalangan generasi muda.	<ul style="list-style-type: none"> - Generasi muda - Penutur tradisi lisan - Tokoh adat - Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pemahaman kepada generasi muda, pentingnya tradisi lisan - Melakukan perlombaan antara desa, kelurahan dan komunitas yang melibatkan generasi muda. - Membentuk komunitas dan melibatkan anak muda yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengemas lomba yang memiliki muatan tradisi lisan dan dilakukan agenda tahunan. - 50 % meningkatnya pengetahuan tradisi lisan di kalangan generasi muda. 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % Meningkatnya pemahaman tradisi lisan di kalangan anak muda. - 100 % generasi muda melibatkan diri dalam perlombaan tradisi lisan. 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % generasi muda memiliki lembaga yang konsisten pada tradisi lisan. - 100 % generasi muda dapat membantu melakukan sosialisasi pentingnya tradisi lisan di sekolah-sekolah. 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % generasi muda memahami betapa pentingnya tradisi lisan. - 100 % pengembangan tradisi lisan dilakukan pada anak-anak hingga orang dewasa. - 100 % setiap desa, kelurahan memiliki komunitas



					konsen pada tradisi lisan.				yang konsen pada tradisi lisan. -
3	Sebagian orang beranggapan bahwa cerita rakyat, mitos dan legenda adalah cerita tidak benar.	Melakukan sosialisasi pemahaman pentingnya nilai yang terkandung pada cerita rakyat, mitos dan legenda	Dapat meningkatkan pemahaman pentingnya ceritarakyat, mitos dan legenda sebagai asal-usul suatu tempat yang terdapat dalam <i>cerita rakyat</i> serta makna yang terdapat dalam cerita.	<ul style="list-style-type: none"> - Generasi Muda - Penutur cerita rakyat, mitos dan legenda. - Tetua adat - Orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan dokumentasi jenis cerita rakyat, mitos dan legenda yang terdapat pada masyarakat - Pendokumentasian ke dalam bentuk audio dan video untuk dijadikan flim pendek untuk anak-anak - Menyusun kurikulum muatan lokal di 	<ul style="list-style-type: none"> - 50 % pendokumentasi jenis cerita rakyat, mitos dan legenda yang terdapat pada masyarakat di bukukan. - 50 % cerita rakyat, legenda dan mitos yang dijadikan flim pendek untuk anak-anak telah 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % jenis cerita rakyat, mitos dan legenda yang telah dibukukan disebarkan di sekolah, lembaga kesenian dan masyarakat. - 100 % cerita rakyat, legenda dan mitos yang dijadikan flim pendek untuk anak-anak 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % Cerita rakyat, mitos dan legenda dalam bentuk tertulis maupun flim telah tersebar di sekolah dan masyarakat dan sudah dipahami isi/maknanya. - 100 % penyusunan kurikulum muatan lokal di 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % masyarakat telah memahami kandungan yang terdapat pada cerita rakyat, mitos dan legenda dalam bentuk tertulis maupun flim. - 100 % masyarakat telah menyadari betapa penting mengetahui kandungan yang terdapat dalam cerita



					tingakt sekolah.	berlangs ung. - 100 % penyusun an kurikulu m muatan lokal di tingakt sekolah.	dipublikas i secara masal. - 100 % penyusun an kurikulum muatan lokal di tingakt sekolah telah berlangs ng	tingakt sekolah.	rakyat, mitosdan legenda. - 100 % penyusuna n kurikulum muatan lokal di tingakt sekolah berjalan dengan baik.
--	--	--	--	--	---------------------	---	---	---------------------	--



VII.1.3. ADAT ISTIADAT

NO.	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TUJUAN	SASARAN	TAHAPAN KERJA	INDIKATOR CAPAIAN			
						2024	2029	2034	2039
1	Minimnya keterlibatan generasi muda dalam ritual adat tertentu karena merasa tidak penting ritual tersebut	Mengajak partisipasi generasi muda dalam melakukan ritual adat tertentu	Meningkatnya minat generasi muda untuk mempelajari dan memahami adat istiadat	<ul style="list-style-type: none"> - Generasi muda - Keluarga - Tokoh adat - Tokoh agama - Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pentingnya pelaksanaan ritual adat dan maknanya. - Mengidentifikasi jenis dan bentuk adat istiadat - Menyebarkan dan melibatkan generasi muda setiap melakukan ritual adat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan buku tentang adat istiadat generasi muda tertarik mempelajari dan memahami adat istiadat 	<ul style="list-style-type: none"> - 80% masyarakat melibatkan diri pada ritual adat istiadat - Pembagian buku adat istiadat kepada masyarakat berdasarkan kepemilikan etnik. 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% masyarakat melibatkan diri pada ritual adat istiadat - Buku adat istiadat telah beredar di masyarakat dan sekolah-sekolah untuk dipelajari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat telah memahami pentingnya memahami adat istiadat. - Masyarakat melibatkan diri pada setiap ritus yang dilakukan

2	Memudarnya nilai-nilai kebersamaan dalam tradisi gotong royong	Memberikan pemahaman kepada generasi muda pentingnya hidup saling tolong-menolong dalam melakukan pekerjaan.	Meningkatkan partisipasi generasi muda untuk menyelesaikan kerja-kerja sosial.	<ul style="list-style-type: none"> - Generasi muda - Tokoh adat - Tokoh agama - Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pentingnya pelaksanaan adat gotong royong. - Melibatkan generasi muda dalam aktifitas yang sifatnya gotong royong. 	<ul style="list-style-type: none"> - 50% generasi muda melibatkan diri dalam setiap aktifitas yang bersifat gotong royong. 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % anak muda telah melibatkan diri dalam aktifitas yang bersifat gotong royong. - Anak muda memiliki lembaga disetipa desa dan keluarga yang konsent rasi kerja yang bersifat gotong royong 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % anak muda telah melibatkan diri dalam aktifitas yang bersifat gotong royong. - 100 % Jenis tradisi yang bersifat gotong royong serta fungsi dan manfaatnya telah dibukukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % masyarakat pada umum memahami pentingnya gotong royong dan merasakan manfaatnya.
---	--	--	--	--	---	---	---	--	--

VII.1.4. RITUS

NO.	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TUJUAN	SASARAN	TAHAPAN KERJA	INDIKATOR CAPAIAN			
						2024	2029	2034	2039
1	Sebagain masyarakat tidak peduli lagi dengan adanya ritus.	Sosialisasi makna dan nilai-nilai yang positif yang terkandung dalam ritus.	Memberikan pemahaman pada masyarakat pentingnya ritual dilakukan dalam kehidupan.	<ul style="list-style-type: none"> - Anak muda - Orang tua - Tokoh agama - Tokoh adat 	<ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisasi masalah yang terdapat pada ritus. - Menginventarisasi nilai-nilai yang terdapat pada tiap ritus. - Mencari format yang efektif untuk menghidupkan kembali ritus. 	<ul style="list-style-type: none"> - 50 % generasi muda tertarik untuk mengikuti proses jalannya ritus yang dilakukan. - Menerbitkan buku cetak, tata cara/proses 	<ul style="list-style-type: none"> - 80% ritual/ritus yang terdapat pada masyarakat mulai dilakoni oleh kalangan masyarakat dan melibatkan anak muda. 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% ritual/ritus di masyarakat telah aktif dilakuka. 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % generasi muda telah memahami pentingnya prosesi ritual dilakukan baik dalam lingkup keluarga maupun dilingkungan masyarakat.



						ritus dilakukan.			- Masyarakat telah memiliki panduan yang baku prosesi pembuatan ritus.
2	Semakin berkurang pemahaman orang tua mengenai ritus	Memperkenalkan ritus yang masih diketahui kepada generasi muda	Memberikan pemahaman kembali serta pendampingan kepada masyarakat dalam pembuatan ritus.	<ul style="list-style-type: none"> - Anak muda - Orang tua - Tokoh agama - Tokoh adat 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendokumentasian ritus yang diketahui ke dalam bentuk catatan/buku dan video. - Mengetahui permasalahan yang terdapat pada ritus. - Melakukan sosialisasi ritus kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - 50 % masyarakat telah memahami dan melakukan ritus kembali. - Membuat dan menerbitkan buku ritus untuk masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - 80 % anak muda telah memahami proses jalannya ritus. - Setiap ritus telah memiliki panduan yang baku. 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % masyarakat telah mengetahui prosesi jalannya ritus dan manfaat ritus dilakukan. Membuat lembaga masyarakat yang konsentrasi menyelesaikan masalah pada setiap ritus. 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % masyarakat telah memahami dan mengetahui ritus. - Setiap lembaga yang konsen pada ritus telah memiliki buku panduan, video pembuatan ritus. - 100 % masyarakat berpartisipasi



									pasi pada tiap pembuatan ritus.
3	Sarana prasarana pendukung ritus sangat minim dan susah ditemukan.	Membuat sarana prasarana sebagai penunjang ritus.	Melengkapi sarana prasarana pendukung ritus untuk masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah - Tokoh adat - masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan kendala adanya sarpras. - Mencari solusi pengadaan sarpras pada masyarakat - Melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam pembuatan sarpras. 	<ul style="list-style-type: none"> 50 % sarpras telah dibuat untuk masyarakat. Masyarakat telah memanfaatkan sarpras sebagai penunjang ritus. 	<ul style="list-style-type: none"> 80 % tradisi telah memiliki sarpras dan mudah di dapat pada setiap desa dan kelurahan Pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan sarpras. 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % tradisi telah memiliki sarpras dan mudah di dapat pada setiap desa dan kelurahan Pemerintah melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan sarpras. 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % tradisi telah memiliki sarpras dan mudah di dapat pada setiap desa dan kelurahan Ritus kembali aktif dan partisipasi masyarakat pada ritus meningkat.



VII.1.5. PENGETAHUAN TRADISIONAL

NO.	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TUJUAN	SASARAN	TAHAPAN KERJA	INDIKATOR CAPAIAN			
						2024	2029	2034	2039
1	Minimnya minat masyarakat untuk mempelajari Pengetahuan Tradisional sehingga hanya ada beberapa orang saja yang dapat melakukan pengetahuan tersebut.	Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengetahuan tradisional agar minat masyarakat makin meningkat.	Agar masyarakat tidak memandang pengetahuan tradisional sebagai sesuatu yang terbelakangan dan kuno.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah - Masyarakat - Anak muda 	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi permasalahan yang terdapat pada masyarakat. - Melakukan pendampingan dan pembinaan oleh pemerintah kepada masyarakat. 	Meningkatkan rasa memiliki dari anak muda dan masyarakat pemilik kebudayaan.	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % Sebagian masyarakat sudah mempelajari pengetahuan tradisional. 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % Mulai mempraktekkan pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat - Masyarakat turut mensosialisasikan pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % Masyarakat sudah terlibat dalam mengimplementasikan pengetahuan tradisional pada kehidupan sehari-hari.



								kepada masyarakat luar.	
2	Sebagian besar generasi muda tidak mengetahui Pengetahuan Tradisional	Melakukan sosialisasi pentingnya mengetahui dan memahami pengetahuan tradisional.	Meningkatnya pemahaman pengetahuan tradisional dikalangan generasi muda	<ul style="list-style-type: none"> - Anak muda - Orang tua - Tokoh agama - Tokoh adat - Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendokumentasian pengetahuan tradisional dan permasalahannya. - Melakukan sosialisasi pentingnya mengetahui pengetahuan tradisional. - Pembukuan jenis dan manfaat pengetahuan tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan tradisional pada masyarakat. - Publikasi buku pengetahuan tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat telah memahami pentingnya pengetahuan tradisional dalam kehidupan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah memiliki pola keberlanjutan pengetahuan tradisional kepada generasi penerus. 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % masyarakat memahami manfaat pengetahuan tradisional dan memanfaatkan dalam kehidupan mereka.
3	Tidak adanya lembaga resmi dari pemerintah maupun masyarakat yang lingkup kegiatannya berhubungan dengan Pengetahuan Tradisional.	Membentuk lembaga atau organisasi yang fokus terhadap objek pengetahuan tradisional.	Agar dapat dilestarikan dengan tidak mengurangi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Anak muda - Masyarakat umum - Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi lembaga seni yang belum terdaftar secara resmi. - Membentuk kelompok atau lembaga khusus 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan minat masyarakat untuk membentuk lembaga. - Merekrut anggota dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada lembaga yang fokus terhadap Pengetahuan Tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lembaga atau organisasi telah bertambah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah banyak lembaga yang dibentuk untuk elestarikan pengetahuan tradisional.



					<p>pengetahuan tradisional.</p> <p>- Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam masyarakat untuk mendapatkan solusinya bersama dengan masyarakat itu sendiri.</p>	<p>masyarakat untuk mengelola lembaga secara baik.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



VII.1.6. TEKNOLOGI TRADISIONAL

NO.	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TUJUAN	SASARAN	TAHAPAN KERJA	INDIKATOR CAPAIAN			
						2024	2029	2034	2039
1	Berkurangnya pelaku pemanfaatan dan penggunaan teknologi tradisional di masyarakat karena masuknya teknologi modern yang dianggap lebih efektif dan lebih mudah penggunaannya dibandingkan teknologi tradisional.	Perlu adanya sosialisasi tentang peningkatan mutu penciptaan dan pemanfaatan dalam menggunakan teknologi tradisional	Untuk meningkatkan daya saing hasil cipta dan pemanfaatan teknologi tradisional dengan modern	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat - Pemerintah -Pemilik kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> -Perlu adanya identifikasi berapa banyak pengrajin teknologi tradisional untuk diperdayakan dalam rangka daya saing dengan produk modern. -Perlu adanya sosialisasi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teknologi tradisional sebagai identitas daerah 	Sudah mulai menggunakan teknologi tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di setiap desa.	Sudah mulai menggunakan teknologi tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di setiap desa.	Sudah mulai menggunakan teknologi tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di setiap desa.	Sudah mulai menggunakan teknologi tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di setiap desa.

2	Minimnya pelaku pembuatan teknologi tradisional. Kebanyakan tidak mengetahui cara penggunaan alat/teknologi tradisional.	Perlu adanya pembinaan terhadap pelaku pemanfaatan dari pemerintah kepada pemilik kebudayaan di daerah tersebut	Untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus mempertahankan budaya lokal	- Masyarakat - Pemerintah - Pengguna teknologi tradisional	Mengidentifikasi pelaku dan pengguna teknologi tradisional di setiap daerah yang memiliki teknologi tradisional tersebut.	Sudah ada pelaku dan pengguna teknologi tradisional di desa-desa	Sudah ada pelaku dan pengguna teknologi tradisional di desa-desa	Sudah ada pelaku dan pengguna teknologi tradisional di desa-desa	Sudah ada pelaku dan pengguna teknologi tradisional di desa-desa
---	--	---	--	--	---	--	--	--	--



VII.1.7. SENI

NO.	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TUJUAN	SASARAN	TAHAPAN KERJA	INDIKATOR CAPAIAN			
						2024	2029	2034	2039
1	Kurangnya fasilitas kesenian seperti kostum dan alat-alat kesenian	Perlu adanya pengadaan peralatan kesenian untuk mendukung pengembangan seni di Daerah (Halmahera Selatan)	Agar tersedianya kebutuhan pertunjukan seni di Daerah maupun Nasional	-Komunitas Seni - Masyarakat - Pemerintah	Identifikasi kebutuhan komunitas seni di Daerah	Tersedianya alat-alat kesenian di Daerah	Telah tersedianya semua kebutuhan peralatan kesenian dan cabang seni di desa-desa	Telah tersedianya semua kebutuhan peralatan kesenian dan cabang seni di desa-desa	Telah tersedianya semua kebutuhan peralatan kesenian dan cabang seni di desa-desa
2	Tidak ada pelatih/pengajar/guru kesenian di daerah	Perlu adanya penambahan atau penerimaan pelatih/guru baik di sekolah maupun di komunitas seni	Untuk peningkatan kualitas kesenian di Daerah	-Pelaku seni - Masyarakat - Pemerintah	Identifikasi pelaku seni (pelatih/guru) kesenian di setiap desa	Tersedianya pelatih/guru di Daerah	Pelatih/guru telah siap mengajarkan seni maupun cabang seni di setiap desa	Sudah tersedianya pelatih/guru seni di desa-desa	Sudah tersedianya pelatih/guru seni di desa-desa
3	Tidak adanya lembaga yang lingkup kegiatannya berhubungan dengan kesenian	Perlu adanya lembaga formal yang	-untuk meningkatkan kreativitas	-Masyarakat -Pemerintah -Pelaku seni	Membentuk lembaga seni di Daerah	Tersedianya lembaga seni yang lingkup	Sudah ada lembaga di setiap desa di Daerah	Sudah ada lembaga di setiap desa di Daerah	Sudah ada lembaga di setiap desa di Daerah

		berhubungan dengan kesenian	masyarakat -untuk mengembangkan kesenian di Daerah			kegiatan yang berhubungan dengan kesenian			
4	Kurangnya fasilitas kesenian (sarana-prasarana)	Perlu adanya fasilitas yang disiapkan pemerintah seperti gedung atau panggung pertunjukan agar pelaku seni dapat berekspresi dengan bebas	Agar pelaku seni tidak bingung dengan tempat pertunjukan	-Masyarakat -Pemerintah -Pelaku seni	Membangun gedung dan panggung pertunjukan sebagai tempat pegelaran seni di Daerah	Terseinya fasilitas pertunjukan seni seperti gedung dan panggung pertunjukan di tiap desa	Sudah ada tempat pertunjukan di setiap desa yang memiliki kesenian dan cabang seni lainnya	Sudah ada tempat pertunjukan di setiap desa yang memiliki kesenian dan cabang seni lainnya	Sudah ada tempat pertunjukan di setiap desa yang memiliki kesenian dan cabang seni lainnya



VII.1.8. BAHASA

No.	Pemasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Anak-anak yang lahir dari orang tua berbeda budaya (asal-usul), atau luar Halmahera Timur, tidak/kurang bisa berbahasa daerah.	Anak-anak yang lahir dan besar di Halmahera Timur perlu memahami dan mampu menuturkan bahasa lokal/daerah Halmahera Timur	Lahirnya generasi muda yang mampu berbahasa daerah	Anak-anak, orang tua, pemerintah	- Membiasakan anak berbicara daerah dengan bahasa daerah dalam keluarga. - Menggelar lomba berbahasa daerah	25% anak-anak dari orang tua hasil perkawinan berbeda budaya dapat berbahasa daerah.	50% anak-anak dari orang tua hasil perkawinan berbeda budaya dapat berbahasa daerah.	75% anak-anak dari orang tua hasil perkawinan berbeda budaya dapat berbahasa daerah.	100% anak-anak dari orang tua hasil perkawinan berbeda budaya dapat berbahasa daerah.
2	Generasi muda lebih menyukai berbahasa Indonesia daripada bahasa daerahnya sendiri.	Menumbuhkan rasa bangga berbahasa daerah kepada generasi muda	Tumbuhnya generasi muda yang bangga menggunakan bahasa daerahnya	Generasi muda, sekolah, masyarakat, pemerintah	- Pelajaran bahasa daerah di sekolah. - Menjadikan pelajaran bhs daerah sebagai bagian kurikulum muatan lokal.	75% sekolah di Halmahera Timur menerapkan muatan lokal	Kurikulum muatan lokal sudah diterapkan	Anak-anak sdh dpt berbahasa daerah dengan lancar	Anak-anak sdh dpt berbahasa daerah dengan lancar

VII.1.9. PERMAINAN RAKYAT

NO.	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TUJUAN	SASARAN	TAHAPAN KERJA	INDIKATOR CAPAIAN			
						2024	2029	2034	2039
1	Generasi muda tidak tertarik dengan Permainan Rakyat dan lebih meilih permainan modern.	Perlu adanya sosialisasi mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam Permainan Rakyat	Agar generasi muda dapat memahami nilai tersebut dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari	-Generasi muda - Masyarakat - Pemerintah	Membuat perlombaan Permainan Rakyat sebagai bentuk dari pelestarian	Sudah ada kegiatan tahunan khusus untuk permainan Rakyat di desa-desa	Sudah ada kegiatan tahunan khusus untuk permainan Rakyat di desa-desa	Sudah ada kegiatan tahunan khusus untuk permainan Rakyat di desa-desa	Sudah ada kegiatan tahunan khusus untuk Permainan Rakyat di desa-desa
2	Munculnya teknologi modern seperti HP membuat Permainan Rakyat menjadi terkikis dengan sendirinya.	Melakukan sosialisasi nilai yang terdapat pada Permainan Rakyat	Untuk menambah pengetahuan tentang objek Permainan	- Masyarakat - Pemerintah	Melakukan sosialisasi tentang pengaruh teknologi modern terhadap	Sudah memahami nilai-nilai yang terdapat pada objek	Nilai-nilai yang terkandung dalam Permainan Rakyat sudah dapat di	Nilai-nilai yang terkandung dalam Permainan Rakyat sudah dapat di	Nilai-nilai yang terkandung dalam Permainan Rakyat sudah dapat di

			Rakyat tersebut		Permainan Rakyat	Permaina n Rakyat	implement asikan dalam kehidupan sehari-hari	implement asikan dalam kehidupan sehari-hari	implement asikan dalam kehidupan sehari-hari
				-					



VII.1.10. OLAHRAGA TRADISIONAL

Tidak ada permainan tradisional dalam kebudayaan masyarakat Halmahera Timur

VII.1.11. CAGAR BUDAYA

NO.	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TUJUAN	SASARAN	TAHAPAN KERJA	INDIKATOR CAPAIAN			
						2024	2029	2034	2039
1	Tidak ada kesadaran warga terkait dengan pelestarian Cagar Budaya . Sehingga beberapa bagian dinding Cagar Budaya seperti benteng telah roboh dimakan usia dan dirusak oleh warga sekitar CB.	Pemerintah seharusnya memberikan pengetahuan tentang pentingnya pelestarian Benda Cagar Budaya di daerah	-Untuk menjaga keaslian Cagar Budaya -agar masyarakat mengetahui pentingnya Cagar Budaya	-Masyarakat -Pemerintah	Melakukan sosialisasi terkait dengan UU Cagar Budaya kepada masyarakat disekitar CB tersebut.	Masyarakat sudah menyadari pentingnya CB yang ada di setiap daerah	Masyarakat sudah menyadari pentingnya CB yang ada di setiap daerah	Masyarakat sudah menyadari pentingnya CB yang ada di setiap daerah	Masyarakat sudah menyadari pentingnya CB yang ada di setiap daerah
2	Belum ada penetapan dari pemerintah tentang Cagar Budaya di daerah	Pemerintah perlu membentuk tim ahli Cagar Budaya di daerah	Untuk melakukan kajian atau studi kelayakan	-Masyarakat -Pemerintah -Sejarawan	Perlu adanya identifikasi tentang CB untuk	Sudah adanya penetapan objek Benteng,			

			suatu objek Cagar Budaya dan ditetapkan sebagai benda Cagar Budaya	-Budayawan -Arsitektur -Arkeolog	diusulkan sebagai benda Cagar Budaya dari tim ahli	Keraton, dan lainnya sebagai benda Cagar Budaya di daerah	Keraton, dan lainnya sebagai benda Cagar Budaya di daerah	Keraton, dan lainnya sebagai benda Cagar Budaya di daerah	Keraton, dan lainnya sebagai benda Cagar Budaya di daerah
3	Sebagian besar CB di halmahera selatan lokasinya berada tepat di tengah-tengah pemukiman warga. Warga menolak untuk melakukan pelestarian (reovasi) karena tidak ada pembebasan lahan. Hal ini yang menyulitkan pemerintah untuk melakukan perlindungan dan pelestarian CB tersebut.	-Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi kepada warga sekitar CB tentang kejelasan wilayah dan keberadaan Objek CB.	Agar supaya tidak terjadi klaim lahan antara warga sekitar CB dan pemilik CB (Pemerintah)	-Masyarakat -Pemerintah	Mencari sejarah keberadaan objek Cagar Budaya untuk mendapatkan kesepakatan lahan milik warga yang menempati sekitar CB tersebut ataukah milik objek.	Sudah ada kesepakatan mengenai lahan objek CB sehingga tidak terjadi konflik	Sudah ada kesepakatan mengenai lahan objek CB sehingga tidak terjadi konflik	Sudah ada kesepakatan mengenai lahan objek CB sehingga tidak terjadi konflik	Sudah ada kesepakatan mengenai lahan objek CB sehingga tidak terjadi konflik
4	Tidak adanya fasilitas pendukung lainnya seperti WC, tempat istirahat, saluran air bersih dan pendukung lainnya	Perlu adanya fasilitas umum di setiap objek Cagar Budaya	Untuk menarik perhatian pengunjung dan mempelaj	-Masyarakat -Pemerintah -Peserta didik	-Perlu adanya pendataan kebutuhan pengguna CB untuk	Sudah tersedianya fasilitas umum seperti	Sudah tersedianya fasilitas umum seperti WC, Tempat	Sudah tersedianya fasilitas umum seperti WC, Tempat	Sudah tersedianya fasilitas umum seperti WC, Tempat

			<p>ari tentang CB serta memfasilitasi komunitas budaya, siswa-siswa ketika mengunjungi objek tersebut</p>	<p>-Komunitas budaya</p>	<p>mengetahui kebutuhan apa saja yang nantinya akan dibangun sebagai fasilitas pendukung disekitar objek Cagar Budaya</p> <p>-Melakukan studi kelayakan dengan melibatkan tim ahli Cagar Budaya agar pembangunan fasilitas tidak merubah bentuk keaslian CB tersebut</p>	<p>WC, tempat istirahat, saluran air bersih, dan lainnya di sekitar objek Cagar Budaya di setiap daerah</p>	<p>istirahat, saluran air bersih, dan lainnya di sekitar objek Cagar Budaya di setiap daerah</p>	<p>istirahat, Saluran air bersih, dan lainnya di sekitar objek Cagar Budaya di setiap daerah</p>	<p>istirahat, Saluran air bersih, dan lainnya di sekitar objek Cagar Budaya di setiap daerah</p>
--	--	--	---	--------------------------	--	---	--	--	--



VII.2. UPAYA

Setiap OPK dalam kebudayaan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur mengalami permasalahan dengan variasi bentuk dan aspeknya masing-masing. Terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan OPK tertentu, tampak adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam mengusahakan keberlanjutan kebudayaan mereka. Namun, upaya ini tidak dilakukan secara terencana, terjadwal, dan sistematis sehingga hasil dari berbagai upaya sulit terukur tingkat keberhasilannya. Beberapa upaya yang secara informal antara lain seperti berikut ini.

- 1) Adanya kesadaran dari kalangan generasi tua atau orang tua dalam keluarga/masyarakat tentang ancaman terkikisnya kebudayaan mereka akibat kemajuan zaman. Karena itu, mereka berusaha memberikan pemahaman kepada anak-anak atau generasi muda.
- 2) Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mendukung upaya yang bertujuan menumbuhkan komunitas seni dan pemerhati budaya.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan berupa festival dan lomba-lomba yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur.

VII.3. PERMASALAHAN UMUM DAN REKOMENDASI UMUM

Permasalahan Umum

- 1) Tradisi terancam punah karena semakin kurangnya pelaku budaya dan rendahnya minat kalangan generasi muda terkait pemajuan kebudayaan.
- 2) Beberapa aspek kebudayaan tradisional dalam OPK dianggap ketinggalan zaman, kuno, tidak adaptif dengan perkembangan zaman, terutama oleh kalangan generasi muda.
- 3) Rendahnya dukungan pemerintah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan sumber daya kebudayaan, lembaga kebudayaan,

dan peraturan yang berkaitan atau mendukung upaya pemajuan kebudayaan.

- 4) Kurangnya dukungan anggaran (finansial) dari pemerintah yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan.

Rekomendasi Umum

- 1) Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur harus menjadikan kebudayaan masyarakatnya sebagai bagian dari kebijakan penting dalam pembangunan daerah dengan mengalokasikan anggaran yang memadai.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana, lembaga, sumber daya, dan regulasi yang mendukung pemajuan kebudayaan melalui pembentukan Tenaga Ahli Cagar Budaya, pembangunan museum kebudayaan, pembentukan forum budaya, penyusunan perbub/perda kebudayaan.
- 3) Pemajuan OPK Bahasa dan budaya masyarakat Halmahera Timur disosialisasikan secara formal melalui sekolah dengan menyusun pelajaran atau kurikulum muatan lokal pada tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), dan menengah (SMP), termasuk upaya-upaya informal di masyarakat dan keluarga.
- 4) Menyusun kamus bahasa daerah di Halmahera Timur (ada 3 bahasa daerah).
- 5) Menyelenggarakan *event* tahunan di bidang kebudayaan yang mewakili berbagai OPK, misalnya Festival *Coka Iba/Fan Ten* yang dirangkaikan dengan OPK lainnya seperti *tarian lala*, dll.
- 6) Melakukan publikasi dan dokumentasi mengenai kebudayaan daerah di Kabupaten Halmahera Timur sebagai upaya pelestarian dan mendukung program literasi nasional di kalangan pelajar dan masyarakat umum.



LAMPIRAN





**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 188.45/450/07/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Setiap Kabupaten wajib menyusun pokok pikiran kebudayaan daerahnya;
- b. bahwa untuk menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Halmahera Timur perlu dibentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja Tim Penyusun;
 - b. Pengidentifikasian keadaan faktual objek-objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Halmahera Timur, termasuk pendataan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan;
 - c. Pengkonsolidasian data hasil identifikasi;
 - d. Analisis atas data yang telah terkonsolidasi, perumusan permasalahan atas setiap objek pemajuan kebudayaan, serta perumusan rekomendasi atas setiap permasalahan;
 - e. Penyusunan laporan akhir dalam bentuk Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan menggunakan format yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - f. Pengajuan Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur kepada Bupati Halmahera Timur untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- KETIGA : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Timur;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal : 17 APRIL 2019

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara
5. DPRD Kabupaten Halmahera Timur di Maba
6. Inspektur Kab. Halmahera Timur di Maba
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur di Maba
8. BPKKAD Kabupaten Halmahera Timur di Maba

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
 NOMOR : 188.45/450/07/2019
 TANGGAL : 17 APRIL 2019
 TENTANG : TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ir. Moh. Abdu Nassar, M.Si.	Sekretaris Daerah	Koordinator
2	Hardi Musa, S.Pd.,M.A.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
3	Firdaus Duko, S.E., M.Si.	Kepala BPKAD	Anggota
4	Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum.	Akademisi	Anggota
5	Drs. Fachmi Alhadar, M.Hum.	Akademisi	Anggota
6	Dr. Arlinah, M.Si.	Akademisi	Anggota
7	Andi Sumar Karman, S.Sos., M.A.	Akademisi	Anggota
8	Safrudin Abdulrahman, S.Sos., M.A.	Akademisi	Anggota
9	Irfan Ahmad, S.S., M.A.	Akademisi	Anggota
10	Bahtiar Hairullah, S.S., M.A.	Akademisi	Anggota
11	Dahmayang Umasangaji, S.E.	Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota

Ditetapkan di : Maba
 Pada tanggal : 17 APRIL 2019

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

MUH DIN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara
5. DPRD Kabupaten Halmahera Timur di Maba
6. Inspektur Kab. Halmahera Timur di Maba
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur di Maba
8. BPKAD Kabupaten Halmahera Timur di Maba



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
MABA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 430 / 42 / DISPARBUD-HT / 2019

Dasar : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Timur menugaskan :

No	Nama	Nip	Jabatan	Email
1.	Dahmayang Umasangadji, SE	197811162006042010	Kepala Bidang Kebudayaan	
2.	Rasmina Siran, S.S	198012242011012002	Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala	
3.	Julita Machmud, SE	198107042008012034	Kepala Seksi Peng. Seni dan Budaya	
4.	Onyong Lukman	198001052009041003	Staf Bidang Kebudayaan	
5.	Siti Megawati Hidayat, S.Tr.Par	199411272019022008	Staf Bidang Kebudayaan	
6.	Aisyah Fachry, S.Tr.Par	199411042019022006	Staf Bidang Kebudayaan	

- Untuk :
1. Memverifikasi aplikasi pokok pikiran kebudayaan (APIK), dalam rangka kegiatan penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019
 2. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas telah melakukan kegiatan dimaksud

Demikian surat perintah tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Maba, 17 April 2019
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Halmahera Timur



Hardi Siran, S.Pd. MA
Penjabat Utama Madya
NIP. 197304242003121005



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
MABA

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 430 / 43 / DISPARBUD-HT / 2019

Dasar : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur 2019

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Timur menugaskan :

No	Nama	Ket
1.	Dr. M. Ridha Ajam, M. Hum.	Koordinator
2.	Drs. Fachmi Alhadar, M. Hum.	Anggota
3.	Andi Sumar Karman, S. Sos., M.A.	Anggota
4.	Safrudin Abdulrahman, S.Sos., M.A	Anggota
5.	Dr. Arlinah, M. Si.	Anggota
6.	Irfan Ahmad, S.S.,M.A.	Anggota
7.	Bahtiar Hairullah, S.S.,M.A.	Anggota

- Untuk :
1. Melaksanakan tugas survey objek pemajuan Kebudayaan untuk pengisian boring dalam penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019
 2. Melaporkan hasil kegiatan Kepala Dinas setelah melakukan kegiatan dimaksud

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Maba, 17 April 2019

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Halmahera Timur



Hardi Musa, S.Pd. MA
Pembantu Utama Madya
NIP. 197304242003121005

